

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN JAKSA AGUNG
SEBAGAI PEJABAT NEGARA SETINGKAT MENTERI
TERHADAP MASA JABATAN JAKSA AGUNG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

HELMY BOEMIYA

NIM. 0810110030



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN JAKSA AGUNG SEBAGAI PEJABAT NEGARA SETINGKAT MENTERI TERHADAP MASA JABATAN JAKSA AGUNG

Oleh :

HELMY BOEMIYA

NIM. 0810110030

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Aan Eko Widiarto, SH.M.Hum.

Riana Susmayanti, SH.MH

NIP. 19760417 200501 1 001

NIP. 19790117 200801 2 013

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Tata Negara

Herlin Wijayati, SH.MH

NIP. 19601020 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN JAKSA AGUNG SEBAGAI PEJABAT NEGARA SETINGKAT MENTERI TERHADAP MASA JABATAN JAKSA AGUNG

Disusun Oleh:

HELMY BOEMIYA

Nim. 0810110030

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Aan Eko Widiarto, SH.M.Hum.

Riana Susmayanti, SH.MH

NIP. 19760417 200501 1 001

NIP. 19790117 200801 2 013

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian

Hukum Tata Negara

Herlin Wijayati, SH.MH

Herlin Wijayati, SH.MH

NIP. 19601020 198601 2 001

NIP. 19601020 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr.Sihabudin, S.H.,M.H

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas karunianya dan segala anugerah serta hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul **Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung**, skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum, shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW, teladan sepanjang zaman yang karena dakwahnya ajaran Islam hadir di Indonesia, tak lupa kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti semoga kita semua selamat dunia akhirat.

Selesainya skripsi ini mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Herlin Wijayati, S.H., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi ini;
4. Ibu Riana Susmayanti, S.H., MH. Selaku Dosen Pembimbing pendamping skripsi ini;

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah dengan sabar memberikan ilmunya dan mengajarkan integritas seorang akademisi kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini selesai.
6. Seluruh Bapak dan Ibu karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membantu penulis.
7. Keluarga Besarku utamanya (Nurhayati) IBU & AYAH (Boedi Mustiko) yang penulis banggakan yang memberikan segalanya buat penulis curahan hati dan kesempatan serta telah sabar membimbing dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan untaian doa yang tak terkira;
8. Mbakku (Merie Cortina, SH) dan adikku (Helda Budiyantri) saudaraku yang penulis sayangi dan cintai yang selalu mengingatkan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Kekasihku R.Roro Tinika Meirina yang dengan kasih dan cintanya setia menemani penulis baik dalam keadaan susah maupun senang. Serta adik iparku Roro Siska Juniyantri yang telah membantu penulis;
10. Keluarga dan Sahabat penulis yang tergabung dalam Asrama Community dan Zombie Community (Kost Kertorahardjo 49): Agung, Arie, Yanpe, Sandi, Adi P, Benjo, Risky, Ikhwan, Bastra, Andika, Rian (Sleem), Gia, Lutfi, Bandar, Antok, mas Dandy, mas Dany, Mbak Chandra, Rendi Rantang, Ibnul, Eko, Heru, Dedi, Panji, Goblin, Ais,

Yanuar, Feby, Anak Riau yang dari awal di Malang dan kuliah setia menemani penulis dan bersama-sama merasakan susah dan senang;

11. Sahabat penulis Angkatan 2008: Rendy Bali, Widhi Sragen, Nano Tuban, Henry, Yudhi, Hersen, Frangky, Rian, Hatman, Dewa, Bonank, Aya, Falian, Gravita, Siska, Intan, Hidayah, Gigih, Indra, Ibnu, Gusdek, Guntur (sinchan), Hidayah, Prisca, Daniar, Zulfa, Reza, Andika, Yeyen, teman-teman kelas D, KKN kelompok IV Suwaluhan Kec. Karang Ploso dan Dulur Community serta kawan-kawanku semua yang belum disebutkan yang telah bersama-sama dari awal kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga Besar Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (FORMAH PK FH-UB), tempat dimana penulis dibesarkan menjadi pribadi yang kuat beretika bermoral dan bertanggung jawab dan telah memberikan penulis pengalaman yang begitu luar biasa;

13. Senior Penulis di Formah PK FH-UB: Alumni, Pendiri Formah, Dewan Penasehat dan Pembina Formah: Pak Adami, Pak Agus, Pak Azhar, Maz Dayat, Maz Tito, Maz Slamet, Maz Andik, Maz Angga, Maz Agus, Maz Ucok, Mbak Finez, Maz Randiet, Maz Nidji, Maz Ahonk, Maz Rozi, Maz Andika, Mbak Reza, Maz Fadli dll. Yang telah membantu penulis menjadi Ketua Umum Formah PK dan menjadi bermanfaat bagi orang lain;

14. Keluarga, Sahabat Seangkatan, Saudara Seperjuangan, Pengurus dan Anggota Formah PK FH-UB angkatan 2008: Anne, Yudhana, Verlyan,

Ulfa Cipit, Sandi (Sankur), Arie Zombie, Sony, Bagus, Agung, Uchi, Yunus, Fahmi, Winda, Syukur, Tio, Yuandhi, Taupan, Satrio Pentol, Lubies, Ayu Fitri, Ciar, Nano, Rendy, Sevi, Dita, Riski, dll. Yang telah bersama-sama membesarkan organisasi tercinta kita serta bersama-sama merasakan susah, pahit dan senang menjalani organisasi;

15. Keluarga, Adek-adekku, Saudara Seperjuangan, Pengurus dan Anggota Formah PK-FH UB angkatan 2009: Adi, Fery, Kausar, Hafidz, Geo, Siska, Grizelda, Ima imul, Gita, Giska, Dewi, Alif, Andrew, Aping, Diby, Bara, Arma, Bobby, Febrian, Ivan Tidar, Faiq, Riski melat, Dewa, Fikri, Mukti, Tina, Cindy, Zaza, Ita, Ovi, Astrid, Ike, Fandi, Mutia, Memed dll. Yang telah bersama-sama membesarkan organisasi tercinta kita serta bersama-sama merasakan susah, pahit dan senang menjalani organisasi;

16. Keluarga, Adek-adekku, Saudara Seperjuangan, Pengurus dan Anggota Formah PK FH-UB angkatan 2010: Rizaldut, Rasya, Eja, Istiqomah, Veby, Hendro, Selvi, Semti, Makkiyah, Mayang, Vio, Danang, Santi, Satrio, Femi, Dahlia, Ike, Hena, Ussy, Dhiastri, Rizal, Tika, Wana, Aap, Aulia, Auliana, Andini, Mustika, Yosi, dll. Yang telah bersama-sama membesarkan organisasi tercinta kita serta bersama-sama merasakan susah, pahit dan senang menjalani organisasi;

17. Keluarga, Adek-adekku, Saudara Seperjuangan, Pengurus dan Anggota Formah PK FH UB angkatan 2011: Andri, Ichal, Diast, Lery, Ardi, Hendy, Davin, Firda, Sofia, Zizi, Irene, Yossie, Bimbi, Jordan, Wildan,

Suci, Jhody, Jerri, Zelanio, Gatra, Arya, dll. Yang telah bersama-sama membesarkan organisasi tercinta kita serta bersama-sama merasakan susah, pahit dan senang menjalani organisasi;

18. Sahabat dan kawan-kawan penulis Lembaga Organisasi/Otonom LO FH-UB: FKPH, BEM, MANIFEST, ALSA, FORSA, LESC, DSM, TEATER KERTAS : Anggi Valentinata SH, Vino Devanta SH, Azrul SH, Cahya, TK SH, Tahegga SH, Ajeng SH, Isdian SH, Dinda SH, Devitha SH, Prisca Listiningrum, Daniar, Zulfa, Arie Tobing, Nurul Mahmudah, Miraj Faris, Fauziah, Angga, Wely, Hendra Wijaya, Daniel, Irwansyah, Suchi, Rifqi, Airin, Rendy, Isdiyana, Ira, Fatma yang telah bersama-sama membangun organisasi mahasiswa menjadi lebih baik dan membawa nama harum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
19. Keluarga Besar Beswan Djarum (penerima Beasiswa Djarum Plus) Khususnya Beswan Djarum Malang (walang): Jonggi, Gentonk, Novika, Momo, Nurul, Yuli, Rifi, Adin, Ema, Eva, Fuji, Rinda, Harvis, Ainun, Al Bima, Firman, Fivi, Rebecca, dll. Yang telah bersama-sama sebagai penerima beasiswa dan menjalani persaudaraan serta kegiatan sosial yang mempuyai nilai nasionalisme Indonesia bersama penulis;
20. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IMABA UB): R.R Tinika Meirina, Arya, Nawwaf, Hardik, Muslim Mubaraok, Holiq, Rusman, Bombom, Mbak Fika, Hermawan, Fuad, Siska, Koko, Gadis, Tutik, Faisal, Yanink, Atika, Mutya, Dandy, Angga, Ichank, Ibnul, Didik, Andika, Nabila, Aji, Alifi, Karina, Fuad, dll. Yang telah bersama-sama

membesarkan Paguyuban tercinta kita serta bersama-sama merasakan susah, pahit dan senang menjalani Paguyuban;

21. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya, terutama doanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ikatan cinta kita dalam sebuah persaudaraan. Semoga kita semua selamat dunia akhirat, Amien.

Penulis sadar bahwa tidak ada gading yang tak retak, begitupula dengan skripsi ini. Kritik dan saran membangun selalu terbuka lebar untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis meminta maaf apabila di dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

“Hidup hanya satu kali, maka pergunakanlah sebaik-baiknya dan dapat lebih bermanfaat bagi orang lain”.

Malang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAKSI	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Negara	13
2.2 Pemisahan Kekuasaan	17
2.3 Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia	23
2.4 Kejaksaan di Negara lain	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Pendekatan Penelitian	36
3.3 Bahan Hukum	36

3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	38
3.5 Teknik Analisis Bahan	39
3.6 Definisi Konseptual.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Masa jabatan jaksa Agung Sejak Awal Indonesia Merdeka hingga saat ini	42
4.1.1 Periode Awal Merdeka Tahun 1945-1961	43
4.1.2 Periode Tahun 1961-1991	49
4.1.3 Periode Tahun 1991-2004	54
4.1.4 Periode tahun 2004-hingga saat ini	59
4.2 Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung.....	65
4.2.1 Kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara	65
4.2.1 Implikasi yuridis Jaksa Agung sebagai pejabat Negara setingkat menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

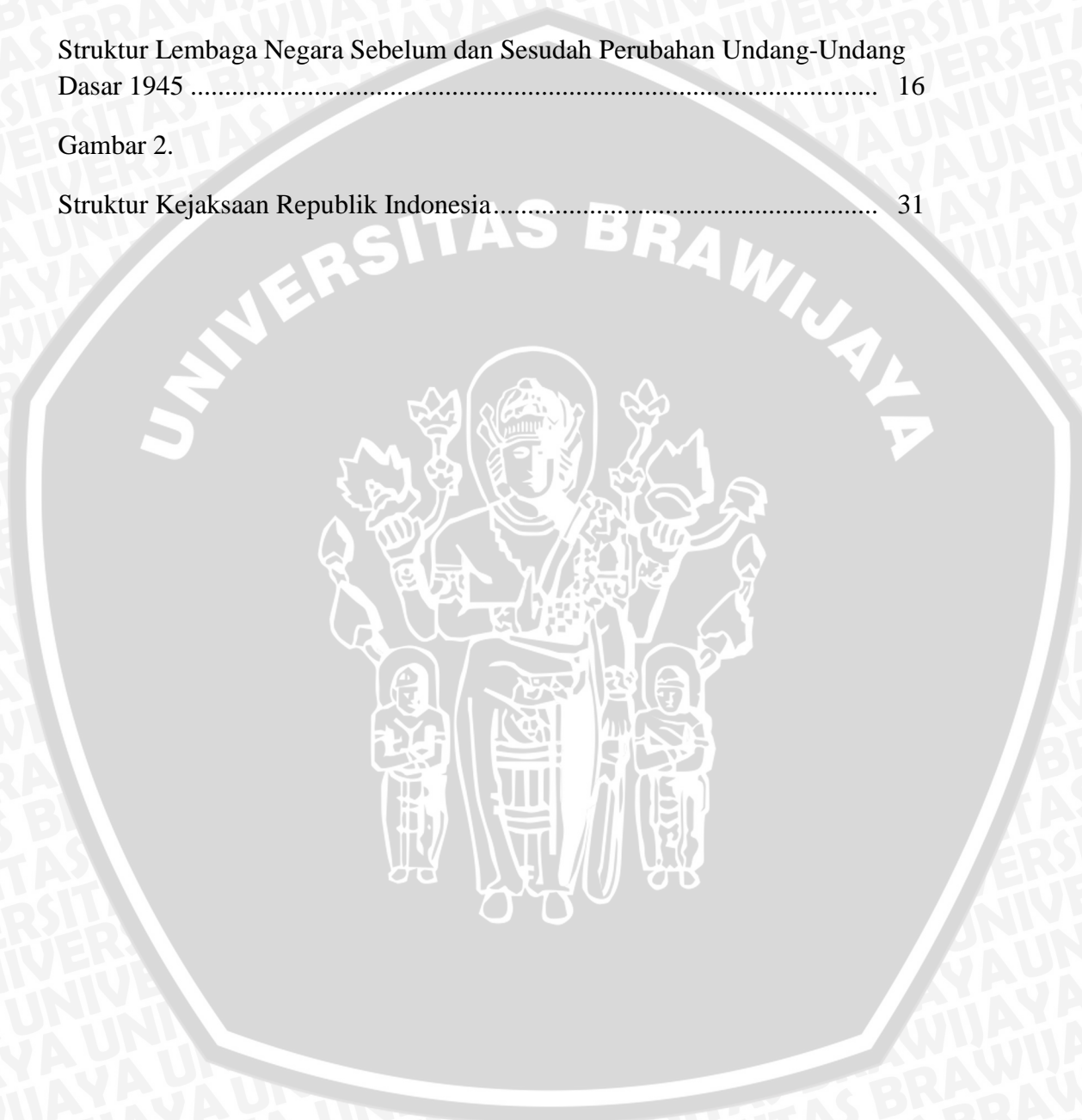
Halaman

Gambar 1.

Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang
Dasar 1945 16

Gambar 2.

Struktur Kejaksaan Republik Indonesia..... 31



DAFTAR TABEL

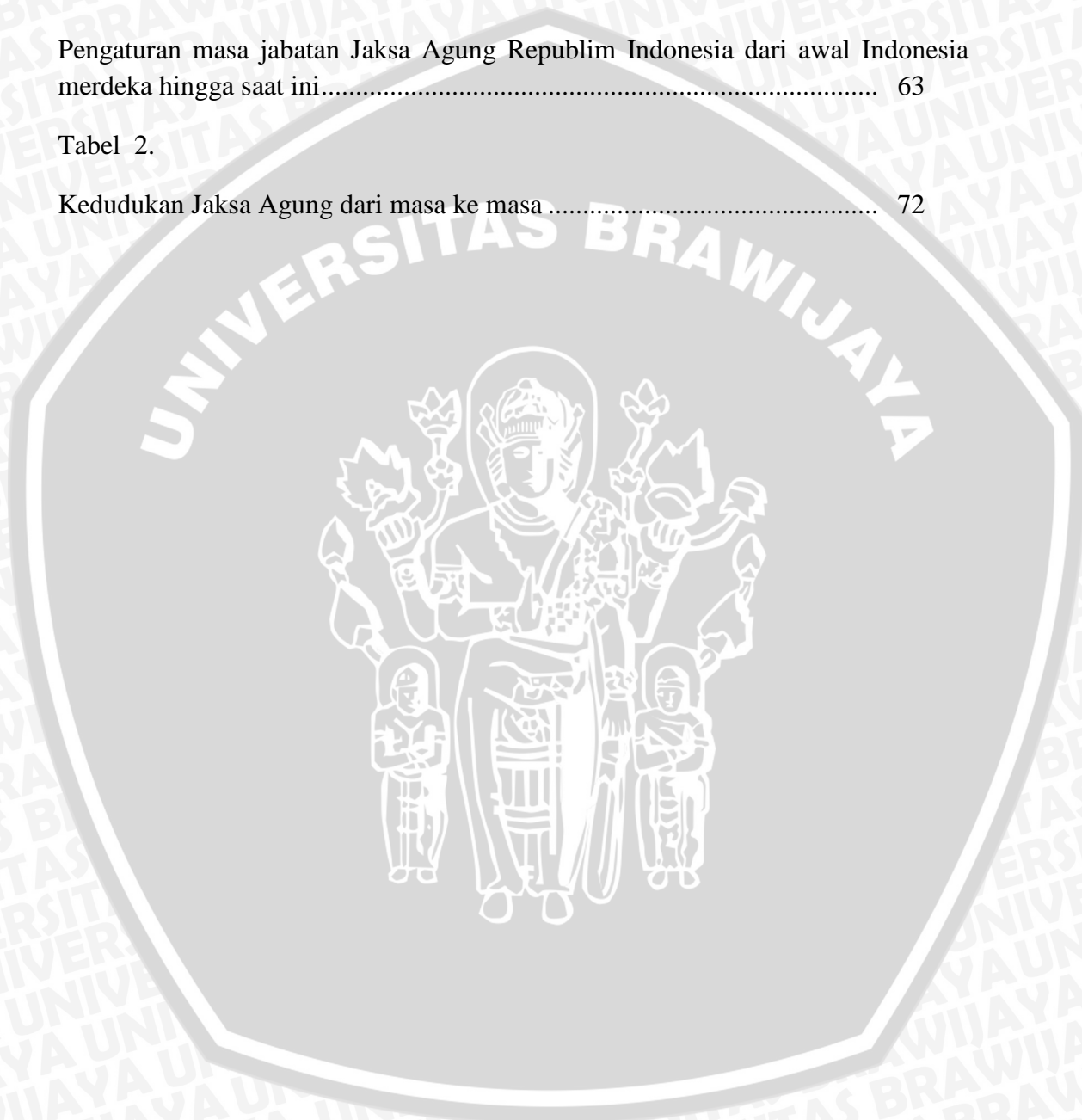
Halaman

Tabel 1.

Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia dari awal Indonesia merdeka hingga saat ini..... 63

Tabel 2.

Kedudukan Jaksa Agung dari masa ke masa 72



Mutiara Qalbu

“Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri”

{QS. AR RA'DU AYAT 11}

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantara Kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya

{QS. Al ‘Alaq Ayat 1-5)

Motto Hidup ;

Tujuan Hidup di dunia ialah “Ibadah” dan Hidup hanya Satu (1) kali, maka pergunakanlah sebaik-baiknya dan dapat lebih bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar.

**Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang**

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

IBU dan AYAH

**Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan
mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan hidup
dan keselamatan di dunia dan akhirat...**

Mbakku dan Adikku

**Semoga rahmat dan hidayah Allah selalu
menyertaimu serta memberikan hidup dan keselamatan
di dunia dan akhirat**

Man Jadda Wa Jadda...

ABSTRAKSI

HELMY BOEMIYA, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012, *Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung Sebagai Pejabat Negara Setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung*, Aan Eko Widiarto, S.H., MHum., Riana Susmayanti, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 yang mempertegas bahwa kejaksaan Agung dalam melaksanakan penegakan hukum dan penuntutan merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun. Banyaknya timbul perdebatan mengenai Jaksa Agung harus berasal dari jaksa karier atau non karier serta adanya kasus mengenai keabsahan jabatan seorang Jaksa Agung dalam memimpin Kejaksaan Republik Indonesia yang dianggap masa jabatannya sudah habis, sehingga berpengaruh terhadap masa jabatan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara.

Oleh Karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengaturan masa jabatan Jaksa Agung sejak Indonesia merdeka hingga saat ini dan implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung, maka jenis penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif yaitu melakukan penelitian hukum dengan menelaah bahan pustaka yang kemudian dipilah-pilah dianalisis, dikaji dan dideskripsikan untuk menemukan permasalahan serta berusaha mencari solusinya.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia sejak awal Indonesia merdeka hingga kini merupakan hak prerogratif Presiden dimana Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab pada Presiden. Hal ini dilakukan dalam beberapa periode yang terdiri dari awal merdeka periode 1945-1960, periode 1960-1990, periode 1990-2004 dan periode 2004 hingga saat ini. Implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung ialah masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.

Menyikapi hasil penelitian yang dilakukan sebaiknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat Undang-Undang yang diberi tugas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melakukan legislative review atau merivisi atau mengamandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih komprehensif dan tidak menimbulkan multi tafsir. Sebaiknya para pembuat Undang-Undang yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengamandemen Undang-Undang mengenai Kejaksaan Republik Indonesia nantinya mengacu pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru baik itu muatan dalam Undang-Undang serta asas-asas yang harus terpenuhi dalam suatu undang-undang tersebut. Serta memperhatikan pengaturan mengenai kedudukan kejaksaan dan Jaksa Agung yang jelas agar mudah dipahami, baik itu dari hal pengangkatan, pemberhentian serta masa jabatan Jaksa Agung dalam memimpin Kejaksaan Republik Indonesia.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI)¹ Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.²

UUDNRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³

Dalam essensinya Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUDNRI Tahun

¹ Selanjutnya disebut UUDNRI

² Marwan Effendi. *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Pratama. Jakarta. 2005. Hal 1

³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1945. Serta untuk lebih memantapkan kedudukan dan perannya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Politik hukum pembentukan Undang-Undang Kejaksaan yang baru dalam menggantikan Undang-Undang kejaksaan yang lama ini bertujuan agar kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dapat bekerja secara independen, mandiri, dan merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁵ Tentu sangat berat sesungguhnya jabatan Jaksa Agung dalam memimpin lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang diharapkan mampu menjadi penegak hukum yang tegas dan tak pandang bulu.

⁴ Lihat Konsideran Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Institusi Kejaksaan memang tidak disebutkan di dalam UUDNRI Tahun 1945 secara eksplisit tetapi penting secara konstitusional (*constitutionally important state institution*).⁶ Hampir seluruh Negara modern di dunia ini mempunyai sebuah institusi yang disebut dengan istilah "Kejaksaan", yang mempunyai tugas utama melakukan penuntutan dalam perkara pidana ke pengadilan. Istilah "Jaksa" atau "Kejaksaan" tidaklah mudah untuk dipersamakan dengan istilah yang sama dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara *attorney general* dengan *public prosecutor*.⁷

Istilah pertama diartikan sebagai "Jaksa Agung" dalam bahasa Indonesia, sedang yang kedua diartikan sebagai "penuntut umum". Demikian pula dalam Bahasa Belanda, dibedakan antara *officer van justitie* untuk istilah "Jaksa" dan *openbaar aanklager* untuk "penuntut umum". Sementara dalam Bahasa Melayu Malaysia digunakan istilah "Peguam Negara" untuk Jaksa, dan "Pendakwa Raya" untuk "penuntut umum", yang kesemuanya berada di bawah Jabatan Peguam Negara. Jabatan ini adalah semacam Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Dalam Negeri.⁸

Di dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tidak menyebutkan institusi kejaksaan secara jelas, di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) dan UUD sementara (UUDS) 1950 yang menganut sistem parlementer di temukan kata Jaksa Agung dalam konteks pejabat tinggi Negara. Presiden Soekarno setelah Dekrit Presiden 1959 mengeluarkan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi*. Sinar grafika, Jakarta, 2010 hal. 187.

⁷ Makalah Yusril Ihza Mahendra 2010, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUDNRI Tahun 1945*. (online) <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/08.html>, hal 1 (15 Desember 2011)

⁸ *Ibid.*,

Keputusan Presiden (Keppres) No. 204 Tahun 1960, yang secara tegas memisahkan Kejaksaan dari kementerian kehakiman dan Mahkamah Agung dan menjadikan bagian langsung dari kabinet dan Jaksa Agung diangkat sebagai anggota kabinet.⁹

Andi Hamzah¹⁰ mengatakan kinerja Kejaksaan hanya mungkin dilakukan jika posisi Kejaksaan dikembalikan ke habitatnya, yaitu sebagai bagian dari lembaga Kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang mengatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan ayat (3) “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.

Itulah sebabnya pada 1945-1959 Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Hal itu membawa dampak lebih jauh, yaitu Jaksa Agung tidak berada di ranah eksekutif sepenuhnya. Dalam hal penuntutan, apalagi sejak Jaksa Agung duduk dalam sidang kasasi Mahkamah Agung, Jaksa Agung tidak dapat lagi diberi perintah oleh eksekutif atau presiden. Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1950 yang berlaku sampai 1965 disebutkan Mahkamah Agung terdiri atas 1 ketua dan 5 anggota dan 1 Jaksa Agung dan 4 Jaksa Agung muda. Jadi, Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda termasuk kelengkapan Mahkamah Agung. Sejak 1961, Kejaksaan dijadikan lembaga tersendiri terlepas

⁹ *Ibid.*, hal 4-5.

¹⁰ Andi Hamzah 2010. *Menyoal Wacana Jaksa Agung Karier-Non-Karier*. (online) <http://mediaindonesiacom/2010/10/Menyoal-Wacana-Jaksa-Agung-KarierNonkarier.htm> oleh Prof Dr (Jur) Andi Hamzah Pensiunan jaksa utama; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti (13 Desember 2011) hal 1

dari Departemen Kehakiman lalu Jaksa Agung menjadi menteri, kemudian setingkat dengan menteri.¹¹

Sepanjang sejarah Kejaksaan, pada posisi Jaksa Agung banyak dipegang oleh orang luar Kejaksaan (Jaksa Agung non-karier), daftar Jaksa Agung non-karier dari kalangan militer maupun nonmiliter, yaitu Jenderal A Soethardhio, Jenderal Sugih Arto, Jenderal Ali Said, Jenderal Ismail Saleh, Jenderal Hari Suharto, Laksamana Sukarton Marmosudjono, Jenderal Andi Ghalib, Marzuki Darusman, Marsillam Simanjuntak, Abdul Rahman Saleh.¹² Pendapat dari Andi Hamzah ini merupakan reaksi terhadap beberapa pendapat pakar yang memperdebatan posisi dan kedudukan Kejaksaan dan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara yang setingkat Menteri serta permasalahan Jaksa Agung karier atau non-karier dan masa jabatan Jaksa Agung.

Kemudian juga ada pendapat dari Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra berpendapat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sudah waktunya diamandemen. Yusril merupakan pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pengujian Undang-Undang (PUU) terkait masa jabatan Jaksa Agung. Menurut Yusril terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan, di antaranya tentang pengangkatan Jaksa Agung dan posisinya di dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut diungkapkan Yusril di hadapan rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).¹³

¹¹ *Ibid.*,

¹² Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung dari masa ke masa. (online) <http://www.kejaksaan.go.id/> (14 Desember 2011)

¹³ Kompas, 2011. Saatnya Amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. (online) <http://nasional.kompas.com/read/2011/09/26/20532135/> (14 Desember 2011)

Menurut Yusril, posisi Jaksa Agung yang berada di bawah Presiden tidak perlu diubah. Di bawah Presiden ataupun tidak bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan merupakan pilihan kebijakan politik hukum sehingga tidak ada masalah diletakkan di mana pun.¹⁴

Hanya saja, Yusril mengusulkan agar pola pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung diubah. Pengangkatan Jaksa Agung perlu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Hal tersebut dimaksudkan agar penentuan Jaksa Agung tidak absolut berada di tangan Presiden atau hak prerogatif Presiden dan pemberhentiannya harus diperjelas juga karena terkait juga dengan masa jabatan Jaksa Agung itu sendiri.¹⁵

Belakangan ini timbul wacana adanya amandemen mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam rencana amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, diusulkan untuk melibatkan DPR RI dalam proses pemilihan Jaksa Agung melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* seperti yang dilakukan terhadap pengangkatan atau pemilihan Kapolri dan Panglima TNI, dimana Presiden mengajukan beberapa calon dan meminta persetujuan DPR RI. Selama ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung ditunjuk langsung oleh Presiden atau hak prerogatif Presiden.¹⁶

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, ada beberapa pokok pemikiran yang akan digulirkan sebagai politik hukum dalam amandemen Undang-Undang

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Kompas, 2011. *Jaksa Agung diusulkan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat*. (online) [http://nasional.kompas.com/read/2011/12/13/13292657/Jaksa.Agung.Diusulkan.Dipilih.DPR\(14 desember 2011\)](http://nasional.kompas.com/read/2011/12/13/13292657/Jaksa.Agung.Diusulkan.Dipilih.DPR(14%20desember%202011))

Nomor 16 Tahun 2004. *Pertama*, usulan mengeluarkan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dari pemerintahan (eksekutif) dan memasukkannya sebagai bagian kekuasaan kehakiman (yudikatif). *Kedua*, melibatkan DPR RI dalam pemilihan Jaksa Agung. *Ketiga*, keinginan membatasi pengertian "kepentingan umum" dalam kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan wewenang mengesampingkan perkara atau *deponeering*.¹⁷

Selain itu, juga diusulkan agar Jaksa Agung harus berasal dari pegawai karier atau dengan kata lain Jaksa karier dan juga perlu diperjelasnya lagi mengenai masa jabatan Jaksa Agung setelah timbulnya permasalahan keabsahan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Menurut Basrief, rencana amandemen awalnya dilatarbelakangi oleh dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan Kejaksaan. Pertama, putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 tanggal 22 September 2010 mengenai masa jabatan Jaksa Agung berakhir bersama jabatan Presiden. Kedua, putusan MK Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang pembatasan kewenangan Kejaksaan dalam melarang peredaran buku yang isinya dinilai mengganggu ketertiban umum.¹⁸

Tentu banyak pertimbangan dengan adanya rencana amandemen Undang-Undang Kejaksaan karena disatu sisi Kejaksaan dengan pimpinannya Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk tegas tak pandang bulu dan bebas dari pengaruh kekuasaan tetapi di sisi lain kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri yang ada dalam wilayah kekuasaan eksekutif membuat Jaksa Agung berada di posisi yang

¹⁷ *Ibid.*, Hal 2

¹⁸ Kompas, 2011. *Jaksa Agung diusulkan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat*. (online) <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/13/13292657/Jaksa.Agung.Diusulkan.Dipilih.DPR> (14 Desember 2011)

sangat strategis dan berpengaruh juga dengan masa jabatan Jaksa Agung tersebut sehingga timbul persoalan seperti kasus mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji yang dianggap tidak sah atau Jaksa Agung ilegal oleh Yusril Ihza Mahendra.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul **“IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN JAKSA AGUNG SEBAGAI PEJABAT NEGARA SETINGKAT MENTERI TERHADAP MASA JABATAN JAKSA AGUNG”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan masa jabatan Jaksa Agung sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini ?
2. Bagaimana implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan menganalisis pengaturan masa jabatan Jaksa Agung sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini.
2. Mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian, selain mempunyai tujuan yang jelas, juga di harapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang di teliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa :

- i. Dapat mempelajari lebih dalam mengenai pengaturan masa jabatan Jaksa Agung sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini.
- ii. Dapat mengetahui implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung.
- iii. Dapat menambah keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Bagi Masyarakat :

- i. Memberikan wacana tentang reformasi di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia.

- ii. Memberikan informasi tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung.
- c. Bagi Pemerintah :
 - i. Memberikan pengetahuan mengenai implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung.
 - ii. Memberikan rekomendasi pembenahan Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung.
 - iii. Memberikan rekomendasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai kedudukan Jaksa Agung Republik Indonesia dan masa jabatannya dalam Ketatanegaraan Indonesia.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab. Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul (implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung). Teori yang dimaksud adalah teori Lembaga Negara, teori Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip “*checks and balances*”, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hukum Tata Negara dan beberapa Kejaksaan di Negara lain.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang digunakan : bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan, dijelaskan lebih lanjut berbagai pembahasan mengenai rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai pengaturan masa jabatan Jaksa Agung sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini. Yang terdiri dari pengaturan Jaksa Agung dari periode awal Indonesia merdeka hingga saat ini, didalamnya akan dijelaskan mengenai dasar hukum penetapan/pengangkatan Jaksa Agung, masa jabatannya dan pemberhentian Jaksa Agung. Dan juga disertakan pembahasan mengenai implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung serta implikasi putusan MK Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 dalam

pengujian Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap masa jabatan Jaksa Agung.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Negara

Berbicara lembaga tentang kelembagaan Negara dapat dipastikan erat kaitannya dengan konsep struktur ketatanegaraan, lembaga Negara, badan pemerintahan serta tugas dan wewenangnya. Adapun struktur ketatanegaraan mempunyai pengertian yang sama *the structure of government* atau susunan pembagian kekuasaan yang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan peraturan susunan dan bentuk pemerintahan serta hukum tata negara¹⁹

Definisi dan pengertian lembaga Negara sangat beragam. Didalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara digunakan istilah *potical institution* sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen* sementara itu dalam bahasa Indonesia menggunakan lembaga Negara, badan Negara atau organ Negara.²⁰

Sebenarnya, secara sederhana, istilah organ Negara atau lembaga Negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau organisasi Nonpemerintahan. Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai Lembaga Negara. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata lembaga diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal

¹⁹ Philips A. Kana. *Tentang Negara dalam Sistem Ketatanegaraan UUD dalam Skripsi Tahegga. Revitalisasi peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam Melakukan Pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2011 Hal 17

²⁰ Nikmatul Huda. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi dalam skripsi Tahegga Revitalisasi peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam Melakukan Pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia*. 2011 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Hal 17

(yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.²¹

Montesquieu dalam ajarannya yang bernama *trias politica* mengatakan fungsi kekuasaan Negara itu terdiri dari fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Menurut John Locke fungsi kekuasaan Negara itu terdiri dari fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif. Sementara itu sarjana Belanda C. van Vollenhoven mengatakan fungsi kekuasaan Negara itu terdiri dari fungsi *regeling* (pengaturan), fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan), fungsi *rechtsspraak* atau peradilan dan fungsi *politie* yaitu yang berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. *Konsepsi trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.²²

2.1.1 Konsepsi tentang Organ Negara

Untuk memahami pengertian organ atau lembaga Negara secara lebih dalam, kita dapat melihat dari pandangan Hans Kelsen yang menguraikan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum adalah suatu organ. Artinya, organ Negara itu tidak selalu berbentuk hukum, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan hukum dapat pula disebut organ, asalkan

²¹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 1997. Dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi*. Sinar grafika, Jakarta, 2010 hlm. 27

²² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi*. Sinar grafika, Jakarta, 2010 hal. 27-31.

fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan bersifat menjalankan norma. Dengan demikian, lembaga atau organ Negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat, yaitu jabatan umum, jabatan hukum dan pejabat umum dan pejabat hukum. Konsep Negara dan lembaga Negara itu sangat luas maknanya, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.²³

Pertama, organ Negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying*. *Kedua*, organ Negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian yang pertama yaitu yang juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. *Ketiga*, organ Negara dalam arti sempit yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Didalam pengertian ini lembaga Negara mencakup pengertian lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden ataupun keputusan Presiden yang tingkatannya lebih rendah baik ditingkat pusat ataupun daerah. *Keempat*, organ Negara atau lembaga Negara itu hanya sebatas pada pengertian lembaga-lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang, atau peraturan yang lebih rendah serta lembaga Negara tingkat pusat dan daerah. *Kelima*, dalam arti sempit lembaga Negara yang kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945 disebut sebagai lembaga tinggi Negara.²⁴

²³ *Ibid*, hal 31-33

²⁴ *Ibid*, hal 35-37.

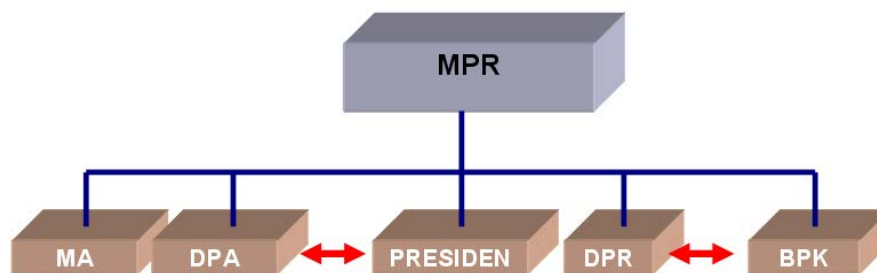
2.1.2 Pemahaman tentang Lembaga Negara

Lembaga Negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga Negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Hierarki kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.²⁵

Gambar 1.

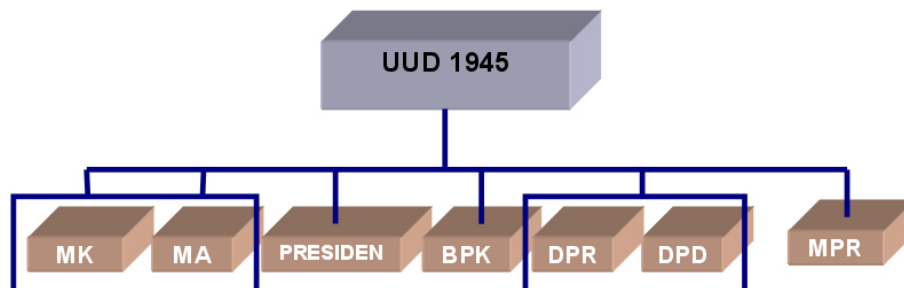
Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945

Struktur Ketatanegaraan RI Sebelum
Perubahan UUD 1945



²⁵ *Ibid*, hal 37.

Struktur Ketatanegaraan RI Setelah Perubahan UUD 1945



Catatan:

Beberapa lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945:

Komisi Yudisial

suatu komisi pemilihan umum

suatu bank sentral

Sumber : Bahan Hukum Sekunder (situs resmi Sekretaris Negara Republik Indonesia. Struktur Lembaga Negara sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945 (online) <http://www.setneg.go.id/> 15 Januari 2011)

2.2 Pemisahan Kekuasaan dalam Perspektif Teoritis Historis

2.2.1 Ragam Pengertian Pemisahan Kekuasaan

Negara hukum tidak berarti apa-apa apabila kekuasaan penguasa Negara masih bersifat absolut dan tidak terbatas. Persoalan yang muncul adalah bahwa dalam konstitusi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara di berbagai Negara terdapat berbagai pemahaman tentang “pemisahan kekuasaan”. Dalam kaitan dengan teori pemisahan kekuasaan ini, timbul berbagai pemahaman tentang sistem *cheks and balances*, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, delegasi kekuasaan legislatif, tanggung jawab eksekutif terhadap badan pembentuk undang-undang, hak uji materiil dan sebagainya. Oleh karena itu muncul berbagai modifikasi paham pemisahan kekuasaan.²⁶

²⁶ Marwan Effendi. *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Op.Cit. hal 36-37.

Konsentrasi kekuasaan Negara Inggris terletak pada badan legislatifnya, yang dalam pengertian tertentu lebih unggul dari pada badan eksekutif dan yudikatif. Oleh sebab itu muncul kritikan terhadap deskripsi Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan di Negara Inggris. Sistem hukum Amerika Serikat memisahkan kekuasaan antara Presiden dan Kongres. Badan eksekutif tidak dapat diganti atau dibubarkan oleh badan pembuat undang-undang. Demikian juga kekuasaannya bukan berasal dari yang lain karena masing-masing merupakan koordinat atau sederajat untuk memperoleh kekuasaannya secara terpisah berdasarkan konstitusi. Berkenaan dengan pemisahan kekuasaan yudikatif dari badan legislatif dan eksekutif, doktrin pemisahan kekuasaan tidak digunakan secara konsisten untuk mendukung lembaga yudikatif dalam membatalkan tindakan lembaga legislatif dan eksekutif. Sebaliknya sistem di Prancis mengimplikasikan bahwa kekuasaan yang terpisah tidak boleh bercampur fungsinya dengan fungsi yang lain.²⁷

2.2.2 Pemikiran John Locke dan Montesquieu

John Locke bereaksi terhadap absolutisme ketika ia mendukung pembatasan kekuasaan raja, dengan alasan bahwa tujuan manusia memasuki suatu “*social contract*” adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki. Ketiga modal dasar itu dipandang sebagai “milik” yang memberikan kepada manusia status politik. Dalam konteks pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan tersebut, John Locke membagi kekuasaan atas: *pertama*, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); *kedua*, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan *ketiga*, kekuasaan (federatif).²⁸

²⁷ *Ibid.*, hal 37-38.

²⁸ *Ibid.*, hal 39

Selanjutnya, John Locke mengembangkan fungsi Negara menjadi empat, yaitu sebagai pembentuk undang-undang (*legislating*), sebagai pembuat keputusan (*judging*), sebagai pengguna kekuatan baik secara internal untuk melaksanakan undang-undang maupun secara eksternal, di luar negeri untuk membela masyarakat. Locke manamakan fungsi pertama "*legislative power*", fungsi kedua "*eksekutif power*", fungsi ketiga "*federative power*", yang meliputi kekuasaan perang dan damai serta kekuasaan luar negeri.²⁹

John Locke hanya merasionalisasi dan mensistemasi fungsi-fungsi kekuasaan Negara, tidak merumuskan teori mengenai pembagian atau pemisahan kekuasaan. Menurut Locke, kekuasaan Negara tidak harus diletakkan atau menjamin hak-hak individual. Namun Locke, mengakui bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan.³⁰

Terpengaruh pemikiran Locke, Montesquieu mengemukakan teori pemisahan kekuasaan Negara dalam tiga bidang, yaitu *pertama* kekuasaan legislatif, yang membentuk Undang-Undang, *kedua* kekuasaan eksekutif, yang melaksanakan Undang-Undang, dan *ketiga* kekuasaan yudikatif, yang menjalankan kekuasaan kehakiman.³¹

Menurut Montesquieu, kebebasan politik hanya ada di Negara-negara di mana kekuasaan Negara dan semua fungsi yang berkaitan tidak berada pada tangan orang yang sama. Montesquieu menyerahkan berbagai fungsi Negara kepada fungsi pembuat Undang-Undang, fungsi membuat keputusan dan melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir adalah mencakup apa yang oleh

²⁹ *Ibid*, hal 39-40.

³⁰ *Ibid*, hal 40.

³¹ *Ibid*, hal 42.

Locke disebut kekuasaan eksekutif dan federatif. Untuk menjamin kebebasan, ketiga fungsi Negara tersebut tidak boleh berada pada satu tangan yang sama.³²

2.2.3 Distribusi kekuasaan

Sir Ivon Jennings membedakan pemisahan kekuasaan dalam pengertian material dan formal, berkaitan dengan itu Ismail Sunny berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dalam pengertian material sepantasnya pemisahan kekuasaan. Sebaliknya, pemisahan kekuasaan dalam pengertian formal disebut pembagian kekuasaan. Kemudian Ismail Sunny menyimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan dalam pengertian material tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan adalah pemisahan kekuasaan dalam pengertian formal. Dengan kata lain di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dengan tidak menekankan pada pemisahannya, bukan pemisahan kekuasaan. Mencermati pandangan di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI) jelas tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan tetapi pembagian kekuasaan.³³

2.2.4 Distribusi Fungsi Pemerintahan

Berbeda pendapat dengan yang diutarakan John Locke dan Montesquieu, C. Van Vollenhoven mengemukakan empat fungsi pemerintahan, yaitu *bewindvoeren* (pemerintahan dalam pengertian sempit), *politie* (polisi), *regeling* (membuat peraturan) dan *rechtspraak* (mengadili). Pembagian dalam empat fungsi pemerintahan yang di ungkapkan Van Vollenhoven tersebut disebut juga dengan istilah *caturpraja*. Fungsi *bestuur* berbeda dari eksekutif konsep Montesquieu karena fungsi *bestuur* mempunyai tugas yang lebih luas, tidak hanya

³². *Ibid*. hal 42-43.

³³ *Ibid*, 45-47.

menjalankan Undang-Undang, tetapi juga meliputi tugas Negara dalam penyelenggaraan kepentingan umum, dan yang tidak termasuk di dalamnya adalah tugas mempertahankan ketertiban umum secara preventif, mengadili atau membuat peraturan. Fungsi bestuur lebih luas dari pada lapangan pekerjaan ketiga kekuasaan lainnya.³⁴

2.2.5 Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip “*checks and balances*”

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ Negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu. Empat diantaranya adalah (a) penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer; (b) pemisahan kekuasaan dan prinsip “*checks and balances*” (c) pemurnian sistem pemerintah presidential; dan (d) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama ini hanya diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi hukum dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertical ke dalam lembaga-

³⁴ *Ibid*, hal 49

³⁵ Jimly Asshiddiqie, 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham RI, 14-18 Juli 2003. Hal 1

lembaga tinggi Negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Akan tetapi, dalam Undang-Undang dasar hasil perubahan, prinsip kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahnya (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga Negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip '*checks and balances*'.³⁶

Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga Negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga hukum legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sekarang berganti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).³⁷

Pasal-pasal yang dapat dianggap mencerminkan perubahan tersebut antara lain adalah perubahan ketentuan pasal 5, terutama ayat (1) juncto pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang secara jelas menentukan bahwa fungsi hukum ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan Presiden adalah kepala eksekutif. Disamping itu, ada pula ketentuan mengenai kewenangan MPR yang tidak lagi dijadikan tempat kemana presiden harus bertanggungjawab atau

³⁶ *Ibid.*, hal 5

³⁷ *Ibid.*, hal 6

menyampaikan pertanggung-jawaban jabatannya. Selain itu, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) juga mencerminkan dianutnya asas pemisahan kekuasaan dan prinsip '*check and balances*' antara cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Ketiga ketentuan itu memastikan tafsir berkenaan dengan terjadinya pergeseran MPR dari kedudukannya sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga yang sederajat dengan Presiden berdasarkan pemisahan kekuasaan dan prinsip '*check and balances*'.³⁸

2.3 Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia

2.3.1 Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.³⁹

2.3.2 Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari

³⁸ *Ibid.*, Hal 7.

³⁹ Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia, 2010. *Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia*. (online) http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1 (4 oktober 2010)

kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.⁴⁰ Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat Negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tadi.⁴¹

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa *adhyaksa* adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang *adhyaksa*.⁴²

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat dan Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.⁴³

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin*

⁴⁰ Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia, 2010. *Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*. (online) http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1 (4 oktober 2010).

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

(pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hooi* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk: 1. Mencari (menyidik kejahatan dan Pelanggaran, 2. Menuntut perkara, 3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal, 4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.⁴⁴

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.⁴⁵ Secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.⁴⁶

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Memasuki masa reformasi Undang-

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.⁴⁷

2.3.2 Visi Misi Kejaksaan Republik Indonesia

Visi dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah untuk “mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam hukum berdasarkan Pancasila”⁴⁸ Berikut adalah Misi dari Institusi Kejaksaan Republik Indonesia⁴⁹:

- a. Menyatukan tata pikir, tata laku, dan tata kerja dalam menegakkan hukum.
- b. Mengoptimalkan pemberantasan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) dan penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Menyesuaikan hukum dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

2.3.3 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari :⁵⁰.

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

⁴⁷ Ibid.,

⁴⁸ Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. 2010. *Visi Kejaksaan Republik Indonesia* (online) http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1 (4 oktober 2010)

⁴⁹ Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. 2010. *Misi Kejaksaan Republik Indonesia* (online) http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1 (4 oktober 2010)

⁵⁰ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

2.3.4 Pelaksana Kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia

a. Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.⁵¹

Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung.

⁵¹ Lihat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Kejaksaan Tinggi

Kepala kejaksaan tinggi pimpinan kejaksaan tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana.⁵²

c. Kejaksaan Negeri

Kepala kejaksaan negeri adalah pimpinan kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kepala kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.⁵³

d. Cabang Kejaksaan Negeri

Kepala cabang kejaksaan negeri adalah pimpinan cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawahkannya. Kepala cabang kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pelaksana.⁵⁴

2.3.5 Pengertian Jaksa Agung Republik Indonesia

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan

⁵² Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵³ Lihat Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁴ Lihat Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.⁵⁵ Jaksa Agung adalah pejabat Negara dan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁵⁶

Jaksa Agung dilarang merangkap jabatan menjadi⁵⁷ :

- a. Pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Advokat
- c. Wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terakait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya.
- d. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta.
- e. Notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah.
- f. Arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- g. Pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang.
- h. Pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

2.3.6 Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang⁵⁸:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.

⁵⁵ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁶ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁷ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵⁸ Lihat Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .
- g. Jaksa agung memberikan ijin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- h. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan setempat atas nama Jaksaa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan dirumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- i. Izin sebagaimana dimaksud diatas, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri .
- j. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

- k. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

2.3.7 Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Gambar 2.

Struktur Kejaksaan Republik Indonesia



Sumber : Bahan Hukum Sekunder (situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia (online) www.kejaksaan.go.id (15 Januari 2012).

2.4 Kejaksaan di Negara lain

a. Kejaksaan Thailand

Kejaksaan Agung Thailand berwenang untuk menangani perkara tindak pidana umum dan perdata serta memberikan pendapat hukum kepada lembaga pemerintahan dan badan-badan usaha milik Negara, Kejaksaan Agung Thailand mempunyai fungsi antara lain : penyelenggaraan Peradilan Pidana, perlindungan

kepentingan Negara, representasi masyarakat umum. Menurut konstitusi Tahun 1997, pengadilan harus berdiri sendiri, bebas dari departemen kehakiman, Kejaksaan Agung berada dibawah departemen kehakiman yang juga mengawasi lembaga pemasyarakatan.⁵⁹ Kejaksaan Thailand berbeda dengan Kejaksaan di Indonesia, jika di Indonesia Kejaksaan Agung diatur tersendiri dalam Undang-Undang Kejaksaan Agung dan berada di dalam lembaga pemerintahan atau eksekutif tetapi tidak dibawah Kementerian Kehakiman melainkan menjadi lembaga tersendiri yang dilaksanakan secara merdeka sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1956 (*The Penal Code 1956*) sementara hukum acara pidana Thailand di atur didalam Kitab Hukum Acara Pidana Tahun 1935 (*the Criminal Prosedure Code 1956*).⁶⁰

b. Kejaksaan Amerika Serikat

Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) adalah kepala Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berurusan dengan masalah-masalah hukum dan pejabat penegak hukum utama dalam pemerintah Amerika Serikat. Jaksa Agung dianggap sebagai pengacara utama pemerintah AS. Jaksa Agung diangkat oleh Presiden Amerika Serikat dan dikukuhkan oleh Senat Amerika Serikat. Jaksa Agung menjabat sebagai anggota kabinet Amerika Serikat di bawah Presiden.⁶¹

Kejaksaan Agung Amerika Serikat disebutkan dengan jelas, Jaksa Agung anggota kabinet dan diangkat oleh Presiden Amerika Serikat dan dikukuhkan oleh senat,

⁵⁹ Marwan Effendi. *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Op.Cit. hal 75-76

⁶⁰ *Ibid*, 76-77

⁶¹ Wikiipedia. 2012. *Jaksa Agung Amerika Serikat*. (online) http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Amerika_Serikat. (tanggal 20 Januari 2012)

berbeda dengan di Indonesia yang di dalam Undang-Undang Kejaksaan mengatakan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan Jaksa Agung adalah pejabat Negara setingkat Menteri dan tidak perlu meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jabatan Jaksa Agung dibentuk oleh Kongres pada 1789, tugas-tugas asli dari pejabat ini adalah "menuntut dan melaksanakan semua tuntutan hukum Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Amerika Serikat, dan memberikan nasihat dan pandangannya tentang masalah-masalah hukum apabila diminta oleh Presiden Amerika Serikat, atau apabila diminta oleh kepala departemen manapun juga." (Undang-Undang Kehakiman tahun 1789, pasal 35.) Baru pada 1870 Departemen Kehakiman dibentuk untuk mendukung Jaksa Agung dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Jaksa Agung tampil secara pribadi untuk mewakili Pemerintah di hadapan Mahkamah Agung dalam kasus-kasus yang sangat penting.⁶² Jabatan Jaksa Agung diatur dalam Undang-Undang Kehakiman sejak 1789 dan dibantu departemen kehakiman tahun 1870 sementara di Indonesia Jaksa Agung baru diatur secara jelas tahun 1961 dengan dibentuknya Undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebelumnya masih diatur melalui UUD 1945 sebelum amandemen pasal II aturan peralihan.

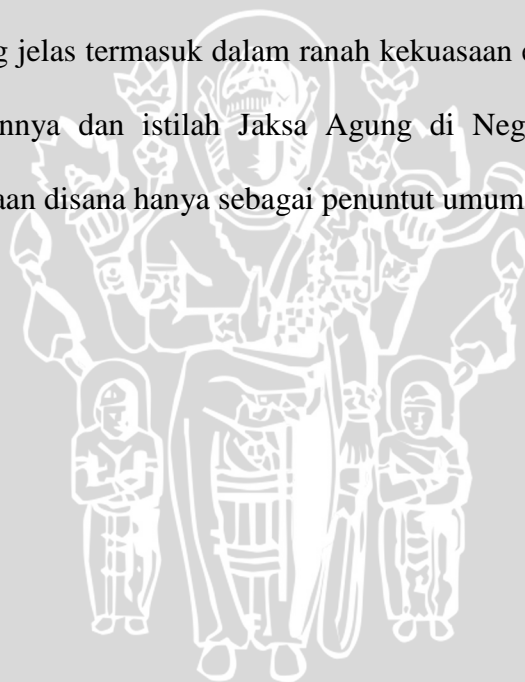
c. **Kejaksaan Philipina**

Di Negara Philipina, Kejaksaan adalah semata-mata penuntut umum (*public prosecutor*) yang pada tingkat nasional di Philipina berada di bawah *Department of justice* (departemen Kehakiman), letak kejaksaan di Philipina tidak rancu dan

⁶² Wikipiedia. 2012. *Jaksa Agung Amerika Serikat*. (online) http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Amerika_Serikat. (tanggal 20 Januari 2012)

jelas berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif. Kepala *Department of justice* di sebut dengan istilah “*Secretary of justice*” lalu istilah menteri (minister) tidak dikenal. *Public prosecutor* sama sekali tidak mempunyai kewenangan intelejen dan penyidikan, semua diserahkan pada NBI (*National Bureau of investigation*) yang berada di bawah *department of justice* sama seperti *public prosecutor*. Istilah *Attorney General* samasekali tidak di kenal, *Attorney* digunakan untuk menyebut advokat profesional yang bekerja sebagai “*lawyer*” swasta.⁶³

Negara Philipina sama dengan Negara Indonesia memakai sistem Presidensial namun di Philipina tidak terdapat kerancuan mengenai kedudukan Kejaksaan Agung yang jelas termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif di bawah departemen kehakimannya dan istilah Jaksa Agung di Negara tersebut tidak dikenal karena Kejaksaan disana hanya sebagai penuntut umum.



⁶³ Yusril Ihza Mahendra 2010, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUDNRI Tahun 1945*. (online) <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/08.html>, (tanggal 15 Desember 2011)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁴ Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan dianalisis berkaitan dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung. Kemudian, dianalisis sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁶⁵ Kemudian Johnny Ibrahim berpendapat sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶⁶

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2009 hal 35

⁶⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta 2001

⁶⁶ Johnny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing Malang hal 294-295

3.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶⁷ Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dimana dalam karya ilmiah hukum ini peneliti hendak menganalisis yuridis terhadap Undang-Undang Kejaksaan dan Jaksa Agung dari awal Indonesia merdeka hingga saat ini dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu,⁶⁸ Dimana dalam karya ilmiah hukum ini peneliti hendak meneliti sejarah mengenai Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung dari masa ke masa atau dari awal Indonesia merdeka hingga saat ini.

3.3 Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Op.cit. Hal 96-97

⁶⁸ *Ibid*, hal 126

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.⁶⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.
 - b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS)
 - c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS)
 - d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen.
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.
 - f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.
 - g. Undang-Undang Nomor 16 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
 - h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - j. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
 - k. Putusan MK Nomor. 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁶⁹ *Ibid*, hal 141

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum dan memberi penjelasan bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - a. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan fungsional Jaksa.
 - b. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.
 - c. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 331/P Tahun 2007 tentang *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu.
 - d. Buku dan Jurnal ilmiah yang terkait dengan Kejaksaan dan Jaksa Agung.
 - e. Artikel internet (situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia).
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah-istilah, yang terdiri dari :
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c. Kamus Inggris-Indonesia

3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku

peraturan-peraturan perundang- undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu penulis melakukan wawancara dan diskusi dengan dosen pembimbing.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara bahan-bahan hukum yang dikategorikan dan disusun secara sistematis. Analisis bahan hukum digunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang telah diperoleh. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan pisau analisis yang ada pada tinjauan pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal literatur baik cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia, dan artikel di internet yang berkaitan dengan Kejaksaan dan Jaksa Agung. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, kemudian diolah dan dianalisis agar dapat dideskripsikan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan selanjutnya ialah membuat kesimpulan agar dapat dipahami.

Proses analisis bahan hukum yang didapat digunakan sistem Interpretasi yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan

hukum.⁷⁰ Adapun metode penafsiran dalam penelitian ilmu hukum normative ini ada tiga metode. Pertama, penafsira gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera di dalam aturan perundang-undangan.⁷¹ Kedua, penafsiran historis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang.⁷² Ketiga, penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.⁷³

3.6.1 Definisi Konseptual

- a. Implikasi yuridis adalah keterlibatan atau keadaan terlibat menurut hukum yang ditimbulkan dengan adanya kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung.
- b. Kedudukan adalah suatu tempat atau posisi yang dijabat oleh seseorang dalam jabatan tertentu.
- c. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab pada Presiden.
- d. Pejabat Negara adalah seseorang yang memegang jabatan penting dipemerintahan yang menurut Undang-Undang memegang atau menerima amanah untuk menduduki posisi atau jabatan tinggi Negara untuk kepentingan rakyat.

⁷⁰ Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV Mandar Maju. Bandung. 2008. Hal 93.

⁷¹ *Ibid.*, hal 96

⁷² *Ibid.*, hal 96

⁷³ *Ibid.*, hal 96

- e. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden bukan pada parlemen.
- f. Masa jabatan adalah waktu atau periode dimana seseorang diberikan tanggung jawab dan tugasnya dalam mengemban amanah yang diberikan oleh Undang-Undang atau melalui proses politik.
- g. Pejabat Negara setingkat Menteri adalah pejabat negara yang disetarakan dengan Menteri Negara dan secara administrasi memiliki jabatan, gaji , fasilitas yang sama dengan Menteri Negara.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Masa Jabatan Jaksa Agung Sejak Awal Indonesia Merdeka hingga saat ini

Sebelum menguraikan tentang pengaturan masa jabatan Jaksa Agung yang memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu dikaji mengenai kedudukan Kejaksaan Agung dalam UUDNRI 1945. Kejaksaan Agung tidak diatur secara eksplisit dalam UUDNRI 1945, meskipun semula hal ini di usulkan dalam rancangan perubahan UUD 1945, tetapi sampai perubahan keempat yang disahkan oleh MPR Tahun 2002. Hal itu tidak mendapat kesepakatan. Akan tetapi dalam kaitan dengan ketentuan pasal 24 ayat (3) yang menyatakan “*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman*”, maka fungsi Kejaksaan jelas sangat berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung dapat dikatakan sebagai salah satu badan yang dimaksud, yang juga penting secara konstitusional (*constitutionally important state institution*).⁷⁴ Jaksa Agung selaku pemimpin tertinggi lembaga ini jelas mempunyai tanggung jawab yang besar dan tugas yang berat sehingga tidak salah seseorang yang menduduki jabatan ini seringkali silih berganti dari periode ke periode , mulai dari Presiden Soekarno hingga saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan berbagai alasan dan berbagai macam cara pemberhentiannya.

⁷⁴ Op. Cit, Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi* hal 187

Berikut akan diuraikan mengenai pengaturan Jaksa Agung pada saat awal Indonesia Merdeka hingga saat ini berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

4.1.1 Periode awal merdeka Tahun 1945-1960

Periode ini terbagi menjadi dua bentuk Negara Republik Indonesia yakni awal merdeka tanggal 17 Agustus 1945-27 Desember 1949 Negara kita berbentuk Kesatuan kemudian berubah karena disepakatinya diplomasi dengan Kerajaan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, Negara kita berbentuk Federal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang hanya bertahan sampai tanggal 17 Agustus 1950 dan setelah itu kembali lagi ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di periode ini pula terdapat dua sistem pemerintahan yakni sistem pemerintahan demokrasi parlementer (1950-1959) dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1965).

a. Peraturan mengenai Kejaksaan dan Jaksa Agung Republik Indonesia

Peraturan yang berlaku pada saat periode ini ialah Undang-Undang Dasar (UUD)⁷⁵ 1945 sebelum amandemen yakni terdapat pada pasal II aturan peralihan, Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Undang-Undang No 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kedudukan Badan-Badan kehakiman dan Kejaksaan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 1959.

⁷⁵ Selanjutnya disebut UUD

Meskipun Indonesia sudah merdeka dan memiliki UUD yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah menunjuk Jaksa Agung, namun di awal kemerdekaan itu Negara Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dan Jaksa Agung tersebut, maka pemerintah tetap menggunakan peraturan-peraturan lama yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda.⁷⁶

Di awal kemerdekaan Negara Indonesia belum memiliki peraturan yang jelas mengenai Kejaksaan Agung apalagi Jaksa Agung, namun di dalam mengatur Kejaksaan Agung pemerintah memakai peraturan lama yang ada dalam *Indische Staatsregeling* (IS) sedangkan untuk menjalankan kewenangannya Kejaksaan memakai *Herzeine Indonesich Reglement* (HIR) yang diperluas dengan *Regering Reglement* (RR) Stb 1992 No 522. HIR kemudian berubah menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB).⁷⁷

Kemudian setelah berlangsung 2 (dua) tahun barulah terdapat Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang mengatur sementara mengenai Kejaksaan dan Jaksa Agung setelah itu Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kedudukan Badan-Badan kehakiman dan Kejaksaan.

Disaat Negara kita berubah bentuk menjadi Negara Federal, pemerintah memakai Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), lalu setelah kembali menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Negara kita memakai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, dan kembali

⁷⁶ *Op, Cit*, Yusril Ihza Mahendra 2010, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUDNRI Tahun 1945*. Hal 1

⁷⁷ *Ibid*, Hal 2

menggunakan UUD 1945 setelah Dekrit Presiden Tahun 1959 akibat gejolak politik dan gagalnya Dewan Konstituante membuat Dasar Negara. Setelah itu sekitar tahun 1961 Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah mulai tertata dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Dasar hukum penetapan/pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia

Dasar hukum penetapan Jaksa Agung terdapat pada pasal II aturan peralihan UUD 1945 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dan Undang-Undang No 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kedudukan Badan-Badan kehakiman dan Kejaksaan. Melalui dasar itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah, Maklumat Pemerintah dan Keputusan Presiden atau peraturan lainnya yang pada saat itu di jabat oleh Presiden Ir. Soekarno.

c. Masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia

Pada zaman ini terdapat sekitar enam (6) orang Jaksa Agung yang pernah menduduki sebagai Jaksa Agung, yakni Mr. Gatot Taroenamihardja, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Tirtawinata, R. Soeprapto, Mr. Gatot Taroenamihardja, Mr. Goenawan. Masa jabatan para Jaksa Agung rata-rata berumur singkat hanya R. Soeprapto yang relatif lama dan Mr. Gatot Taroenamihardja menjabat sebagai Jaksa Agung dua kali yakni Jaksa Agung pertama dan kelima. Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung tidak diperjelas secara rinci dan menjadi kewenangan penuh dari Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sesuai Undang-Undang No 7 tahun 1947 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1948.

Jaksa Agung Republik Indonesia yang pertama (1) ialah Mr. Gatot Taroenamihardja ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1945 tetapi berlaku surut yakni jabatannya dimulai tanggal 19 Agustus 1945, masa jabatan Mr. Gatot Taroenamihardja sangat singkat yakni hanya berumur kurang lebih dua (2) bulan. Dalam masa jabatan yang singkat Mr Gatot sempat mengeluarkan satu maklumat dan satu Intruksi kepada kepala kepolisian dan jajaran kejaksaan untuk bertindak tegas sebagai aparat penegak hukum.⁷⁸

Jaksa Agung Republik Indonesia yang kedua (2) ialah Mr. Kasman Singodimedjo yang diangkat menjadi Jaksa Agung pada tanggal 6 November 1945, masa jabatan Mr.Kasman Singodimedjo berumur kurang lebih enam (6) bulan. Dalam masa jabatan Mr. Kasman sempat mengeluarkan maklumat mengenai Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum dan Instruksi Jaksa Agung mengenai berlakunya HIR.⁷⁹

Jaksa Agung Republik Indonesia yang ketiga (3) ialah Mr. Tirtawinata yang diangkat menjadi Jaksa Agung tanggal 22 Juli 1946, dan ketika Indonesia berubah menjadi RIS Jaksa Agung Tirtawinata mendapat kehormatan menjadi Jaksa Agung RIS. Masa jabatan Mr.Tirtawinata kurang lebih enam bulan. Jaksa Agung Tirtawinata merupakan Jaksa Agung yang pertama menjadi penuntut umum di pengadilan.⁸⁰

Jaksa Agung Republik Indonesia yang keempat (4) ialah R.Soeprapto bentuk Negara sudah kembali lagi menjadi NKRI, masa jabatan Jaksa Agung

⁷⁸ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Gatot Taroenamihardja*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012).

⁷⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Kasman Singodimedjo*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012).

⁸⁰ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Tirtawinata*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012).

Soeprapto kurang lebih Sembilan (9) tahun. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung Soeprapto banyak berjasa dan dianggap sebagai awalan pembaharuan kejaksaan berdasarkan SK Jaksa Agung ke IX Soegiharto, R. Soeprapto ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan.⁸¹

Jaksa Agung Republik Indonesia kelima (5) ialah Jaksa Agung Gatot Taroenamihardja yang menjabat Jaksa Agung untuk kedua kalinya pada tanggal 1 April 1959, masa jabatan Jaksa Agung Mr. Gatot Taroenamihardja berlangsung singkat kurang lebih empat (4) bulan, dalam masa jabatannya tidak banyak perubahan yang dilakukan karena Negara sedang mengalami kekacauan politik.⁸²

Jaksa Agung Republik Indonesia keenam (6) ialah Mr. Goenawan yang diangkat tanggal 31 Desember 1959, masa jabatan Jaksa Agung Goenawan berlangsung kurang lebih dua (2) tahun. Dalam masa jabatannya banyak sekali perubahan yakni kejaksaan menjadi departemen dan terwujudnya Rancangan Undang-Undang Pokok Kejaksaan yang disahkan dan menjadi UU No.15 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kejaksaan Republik Indonesia.⁸³

d. Pemberhentian Jaksa Agung Republik Indonesia

Pemberhentian Jaksa Agung dalam pengaturannya tidak diatur dengan jelas, Namun didalam Undang-Undang No 7 tahun 1947 terdapat dalam pasal 1 ayat (2): *“Disamping Mahkamah Agung adalah Kejaksaan Agung yang terdiri atas satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat*

⁸¹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia R. Soeprapto*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012) lihat juga R. Soeprapto. *Biografi Singkat* (online) <http://www.rsoeprapto.com/biografi-singkat.htm> (tanggal 15 Januari 2012).

⁸² *Op.cit.* Kejaksaan Agung RI. Jaksa Agung Gatot Taroenamihardja.

⁸³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Goenawan*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012).

*beberapa jaksa lain.”*⁸⁴ Dengan begitu pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden, dan Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung.

Lebih jelas pengaturannya di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1948 pemberhentian Jaksa Agung terdapat dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “*Para Hakim dan para Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, begitu juga panitera Mahkamah Agung*”⁸⁵ selanjutnya diatur didalam pasal 21 yakni: Ayat (1) “*Para hakim dan para jaksa dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya: apabila mereka ternyata tidak cakap, apabila mereka diharuskan untuk keperluan Negara, dan apabila mereka telah berumur 60 tahun*”. Ayat (2) “*Selain dari dengan alasan-alasan tersebut mereka hanya dapat diberhentikan dari jabatannya atas permintaannya sendiri*”⁸⁶.

Di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1948 diatur juga mengenai kemungkinan Jaksa Agung dapat dipecat dari jabatannya, aturan ini terdapat dalam pasal 22 yakni: Ayat (1) “*Para hakim dan para Jaksa dapat dipecat, apabila mereka dihukum penjara, tutupan atau kurungan dari sebab menjalankan kejahatan, apabila mereka jatuh pailit atau dimasukkan penjara dari sebab tidak membayar hutangnya, dari sebab kelakuan tidak baik atau tidak sopan atau selalu alpa dalam jabatannya, apabila mereka melanggar larangan tersebut dalam pasal-pasal 15, 17 dan 18 Undang-Undang ini*”. Ayat (2) “*Pemecatan ini*

⁸⁴ Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

⁸⁵ Lihat pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

⁸⁶ Lihat pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

*dilakukan, untuk para hakim Mahkamah Agung dan para jaksa Kejaksaan Agung, atas usul atau pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung, untuk para hakim atas usul atau pertimbangan Jaksa Agung, semua setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri”.*⁸⁷

Pemberhentian Jaksa Agung bermacam-macam modelnya. Jaksa Agung yang pertama Mr. Gatot Taroenamihardja berhenti berdasarkan permintaannya sendiri pada saat pertama kali menjadi Jaksa Agung dan pada saat menjadi Jaksa Agung yang kelima Mr. Gatot diberhentikan dengan hormat. Jaksa Agung Soeprapto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden Soekarno karena keberaniannya dan banyak orang yang tidak suka atas sepak terjang R. Soeprapto yang tegas menegakkan hukum.

4.1.2 Periode Tahun 1960-1990

Periode ini penataan Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung sudah mulai teratur dan lancar karena sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pada periode ini terjadi pergolakan politik yang dahsyat di Tahun 1965-1967, yakni terjadi pergantian pemimpin Negara di mana rezim Presiden Soekarno yang terkenal dengan sebutan Orde Lama lengser (di *Impeachment* oleh MPRS) digantikan dengan rezim baru dibawah komando Jenderal Soeharto yang terkenal dengan sebutan Orde Baru.

Pada zaman ini juga terjadi tragedi Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI) yang hingga saat ini menjadi perdebatan siapa dalang dalam peristiwa tersebut. Peristiwa selanjutnya setelah itu ialah Surat Perintah

⁸⁷ Lihat pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

sebelas (11) Maret (Supersemar) dimana Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan penuh untuk mengamankan Negara kepada Jendral Soeharto, disaksikan oleh Mayjen Basuki Rahmat, Mayjen M.Yusuf dan Jenderal A.H. Nasution, karena Indonesia sedang mengalami kekacauan.

a. Peraturan mengenai Kejaksaan dan Jaksa Agung Republik Indonesia

Peraturan yang berlaku pada zaman ini ialah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960, Undang-Undang No 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kedudukan Badan-Badan kehakiman dan Kejaksaan,.

b. Dasar hukum penetapan/pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia

Dasar hukum penetapan Jaksa Agung terdapat pada pasal II aturan peralihan UUD 1945 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dan Undang-Undang No 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kedudukan Badan-Badan kehakiman dan Kejaksaan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui dasar itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, maklumat pemerintah dan Keputusan Presiden yang pada saat itu di jabat oleh Presiden Ir. Soekarno dan Tahun 1966 di gantikan oleh Pejabat Presiden yang kemudian menjadi Presiden Jenderal Soeharto.

c. Masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia

Pada periode ini terdapat sekitar delapan (8) orang Jaksa Agung yang pernah menduduki sebagai Jaksa Agung, yakni R. Kadaroesman, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI A. Soethardjo, Brigjen TNI Soegih Arto, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Ali Said, Ismail Saleh, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Hari Suharto, Laksamana Muda Sukarton Marmosujuno, SH, Singgih, SH. Masa jabatan para Jaksa Agung di periode Orde baru ini sudah stabil dibandingkan periode sebelumnya dan lebih banyak di duduki oleh kalangan militer. Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung tidak diperjelas secara rinci dan menjadi kewenangan penuh dari Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sesuai Undang-Undang No 7 tahun 1947 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1948, serta Konvensi Ketatanegaraan tahun 1971 yang dilaksanakan oleh Presiden Soeharto.

Jaksa Agung Republik Indonesia yang ketujuh (7) ialah R.Kadaroesman, masa jabatan Jaksa Agung R.Kadaroesman berlangsung kurang lebih dua (2) tahun setelah itu digantikan oleh Jaksa Agung yang kedelapan (8) ialah Brigjen A. Soethardjo yang diangkat pada Tahun 1964 menggantikan R. Kadaroesman, masa jabatan Jaksa Agung Brigjen A. Soethardjo berlangsung kurang lebih dua (2) tahun. Dalam masa jabatannya Irian Barat kembali kepangkuan Ibu Pertiwi NKRI, serta mendirikan Pusat pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) bagi para jaksa.⁸⁸

Jaksa Agung yang ke Sembilan (9) ialah Brigjen Soegih Arto yang diangkat pada tanggal 27 Maret 1966, masa jabatan Jaksa Agung Soegih Arto berlangsung lama kurang lebih enam (6) tahun memimpin Kejaksaan Agung. Dalam masa jabatannya banyak perubahan dan gagasan penting tercipta yakni meninjau ulang

⁸⁸ Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia R.Kadoeresman dan Brigjen A.Soethardjo*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dan peningkatan Struktur Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah.⁸⁹

Jaksa Agung yang kesepuluh (10) ialah Letjen Ali Said yang diangkat pada Tahun 1973, masa jabatan Jaksa Agung Ali Said berlangsung cukup lama kurang lebih tujuh (7) tahun hingga tahun 1981 memimpin Kejaksaan Agung. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung banyak melakukan penyempurnaan di tubuh Kejaksaan Agung, yakni dibentuknya direktorat-direktorat para staf ahli dan asisten-asisten serta sekretaris dalam bidang tertentu, di dalam masa jabatannya pula terjadi peristiwa bergabungnya timor-timur dengan NKRI.⁹⁰

Jaksa Agung yang kesebelas (11) ialah Letjen Ismail Saleh yang diangkat pada tanggal 9 Februari 1981 sesuai dengan Keppres No.32/M Tahun 1981 menggantikan Letjen Ali Said, masa jabatan Jaksa Agung Ismail Saleh berlangsung kurang lebih tiga (3) tahun memimpin Kejaksaan Agung. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung Ismail Saleh sering melakukan “sidak” atau inspeksi mendadak terhadap kejaksaan-kejaksaan yang ada baik di tingkat kejaksaan tinggi hingga kejaksaan daerah. Di bawah pimpinan Jaksa Agung Ismail Saleh Kejaksaan Agung mempunyai acuan baru dengan dikeluarkannya Keputusan Presidium No 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.⁹¹

Jaksa Agung yang keduabelas (12) ialah Mayjen Hari Suharto yang diangkat pada tanggal 4 Juni 1984 menggantikan Jaksa Agung Ismail Saleh, masa jabatan

⁸⁹ Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Brigjen Soegih Arto*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012)

⁹⁰ Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Letjen Ali Said*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012).

⁹¹ Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Letjen Ismail Saleh*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012).

Jaksa Agung Hari Suharto berlangsung kurang lebih empat (4) tahun dalam memimpin Kejaksaan Agung dari tahun 1984-1988. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung Hari Suharto terkenal dengan ketegasannya dalam masalah korupsi, serta di era kepemimpinannya berupaya melakukan pembaharuan penyusunan Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UUPK).⁹²

Jaksa Agung yang ketigabelas (13) ialah Laksamana Muda Sukarton Marwosujono yang diangkat pada tahun 1988 dalam kabinet pembangunan V menggantikan Jaksa Agung Hari Suharto, masa jabatan Jaksa Agung Sukarton Marwosujon berlangsung kurang lebih dua (2) tahun hingga tahun 1990 dikarenakan meninggal dunia dalam masa jabatannya. Dalam masa jabatannya program yang menarik dilakukannya ialah penayangan gambar koruptor di televisi yakni TVRI.⁹³

Dalam periode ini masa jabatan para Jaksa Agung relatif stabil karena Jenderal Soeharto setelah menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 memulai suatu konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti kabinet itu⁹⁴ dan di isi kebanyakan dari kalangan militer yang biasanya setelah lengser dari Jaksa Agung diangkat menjadi menteri Kehakiman. Jaksa Agung periode ini juga sudah mulai berasal dari kalangan internal kejaksaan sendiri bukan dari militer lagi seperti biasanya.

⁹² Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia *Jaksa Agung Republik Indonesia Mayjen Hari Suharto*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012).

⁹³ Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Laksamana Muda Sukarton Marwosujono*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012).

⁹⁴ *Op. Cit*, Yusril Ihza Mahendra 2010, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUDNRI Tahun 1945*. Hal 6

d. Pemberhentian Jaksa Agung Republik Indonesia

Pemberhentian Jaksa Agung di dalam periode ini rata rata banyak yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya hanya Jaksa Agung Laksamana Muda Sukarton Marmosujono yang diberhentikan karena meninggal dunia dalam masa jabatannya. Di dalam periode ini juga kembali menegaskan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden, ini dilakukan sejak presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno dimana pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden, yakni Jaksa Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden.

4.1.3 Periode Tahun 1990-2004

Periode ini Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung sudah melakukan tugasnya dengan baik dan penyempurnaan-penyempurnaan Kejaksaan Agung sudah dilakukan termasuk terbentuknya Undang-Undang yang baru bagi Kejaksaan Agung yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Pada periode ini juga terjadi pergolakan politik yang cukup hebat dimana terjadi pergeseran rezim dari rezim Orde Baru ke era yang baru yakni Reformasi pada tahun 1998 yang mengakibatkan Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama ±32 Tahun mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden B.J Habibie.

Pada periode ini juga terjadi pergolakan politik selanjutnya ialah pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden KH. Abdurrahman Wahid (GusDur) oleh MPR pada tahun 2001 dan digantikan oleh Wakil Presiden pada saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada periode ini marak sekali dengan

pengungkapan kasus-kasus korupsi oleh para aparat penegak hukum utamanya Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Jaksa Agung.

a. Peraturan mengenai Kejaksaan dan Jaksa Agung Republik Indonesia

Peraturan yang berlaku pada periode ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang sudah di amandemen empat kali pada tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Tahun 1959 yang berlaku sampai tahun 1999 setelah itu UUD 1945 di amandemen sebanyak empat kali, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Dasar hukum penetapan/pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia

Dasar hukum penetapan Jaksa Agung terdapat pada pasal 24 ayat (3) UUDNRI yakni “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” , pasal I dan II aturahr peralihan UUDNRI 1945, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui dasar itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah, Maklumat Pemerintah, peraturan Presiden dan Keputusan Presiden yang pada saat itu di jabat oleh Presiden Jenderal Soeharto dan Tahun 1998 di gantikan oleh Presiden Prof. B.J. Habibie, dan Tahun 1999 digantikan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid (GusDur) dan tahun 2001 digantikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.

c. Masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia

Pada periode ini terdapat sekitar tujuh (7) orang Jaksa Agung yang pernah menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung, yakni Singgih, SH., Soedjono C. Atmonegoro SH., Andi Ghalib SH., Marzuki Darusman SH., Baharuddin Lopa SH., Marsilam Simanjuntak SH., M.A. Rachman, SH. Masa jabatan para Jaksa Agung di periode reformasi ini kurang stabil tetapi di awal-awal reformasi terjadi banyak sekali pergantian diakibatkan adanya pergantian Presiden hingga tiga kali dan sudah bermunculan orang internal atau karier dari kejaksaan yang menjadi Jaksa Agung. Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung tidak diperjelas secara rinci dan menjadi hak prerogratif Presiden dan merupakan kewenangan penuh dari Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sesuai Undang-Undang No 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Konvensi Ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh Presiden Soeharto, Presiden B.J Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati.

Jaksa Agung yang keempatbelas (14) ialah Singgih SH yang diangkat pada tanggal 19 Juni 1990 menggantikan Almarhum Sukarton Marosudjono yang meninggal dunia, masa jabatan Jaksa Agung Singgih berlangsung cukup lama yakni kurang lebih delapan (8) tahun dari tahun 1990-1998 memimpin Kejaksaan Agung. Dalam masa jabatannya banyak kasus kasus korupsi terbongkar atas keberhasilannya Presiden memberi penghargaan Bintang Maha Putra Adipradana serta mendapat penghargaan dari Raja Thailand.⁹⁵

Jaksa Agung yang kelimabelas (15) ialah Soedjono C. Atmonegoro yang diangkat Tahun 1998 pada kabinet pembangunan VII menggantikan Jaksa Agung

⁹⁵ Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Singgih SH.* (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012)

Singgih yang sama-sama berasal dari jaksa karier. Masa jabatan Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro berlangsung singkat yakni hanya 88 hari dan diberhentikan oleh Presiden Habibie pada tanggal 15 Juni 1998. Dalam masa jabatannya yang relatif singkat Jaksa Agung Soedjono sempat membentuk tim pengusut harta kekayaan mantan Presiden Soeharto.⁹⁶

Jaksa Agung yang keenambelas (16) ialah Andi Ghalib yang diangkat Tahun 1998 menggantikan Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro, masa jabatan Jaksa Agung Andi Ghalib cukup singkat kurang lebih 1 tahun hingga tahun 1999. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung juga mengalami ketegangan politik pada masa itu mengenai kasus mantan Presiden Soeharto yang ramai dibicarakan di masyarakat.⁹⁷

Jaksa Agung yang ketujuhbelas (17) ialah Marzuki Darusman SH yang diangkat pada tahun 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid menggantikan Jaksa Agung Andi Ghalib, masa jabatan Jaksa Agung Marzuki Darusman berlangsung kurang lebih satu setengah tahun (1,5) hingga tahun 2001. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung Marzuki Darusman berhasil menggiring koruptor ke dalam perangkap hukum yakni contohnya mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin dan Bob Hasan yang merupakan kroni mantan Presiden Soeharto.⁹⁸

Jaksa Agung yang kedelapanbelas (18) ialah Baharuddin Lopa SH yang diangkat Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 6 Juni 2001 menggantikan Marzuki Darusman, masa jabatan Jaksa Agung Baharuddin Lopa berlangsung

⁹⁶ Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Soedjono C. Atmonegoro SH*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012)

⁹⁷ Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Andi Ghalib SH*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012)

⁹⁸ Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Marzuki Darusman SH*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012)

sangat singkat yakni kurang lebih 1,5 bulan yang berakhir pada tanggal 3 juli 2001 karena meninggal dunia. Dalam masa jabatannya yang sangat singkat Jaksa Agung Baharuddin Lopa berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung menyeret koruptor ke pengadilan, keberaniannya menjadi momok bagi para koruptor dan teladan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan.⁹⁹

Jaksa Agung yang kesembilan belas (19) ialah Marsilam Simanjuntak SH yang diangkat Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 Juli 2001 menggantikan Baharuddin Lopa yang meninggal dunia, masa jabatan Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak sangat singkat yakni berlangsung kurang lebih 1 bulan hingga tanggal 14 Agustus 2001. Dalam masa jabatan yang sangat singkat Jaksa Agung tidak banyak perubahan yang dilakukan di tubuh Kejaksaan Agung pada saat itu.¹⁰⁰

Jaksa Agung yang kedua puluh (20) ialah M.A. Rachman yang diangkat pada tanggal 14 Agustus 2001 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, masa jabatan Jaksa Agung M.A. Rachman berlangsung kurang lebih 2,5 tahun hingga 21 Oktober 2004. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung M.A. Rachman melakukan penyusunan dokumen pembaharuan kejaksaan seperti Cetak Biru Pembaruan Kejaksaan dan mulai menata/mengkonsep serta melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.¹⁰¹

⁹⁹ Situs resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Baharuddin Lopa SH*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012)

¹⁰⁰ Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Marsilam Simanjuntak*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012)

¹⁰¹ Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia M.A. Rachman SH*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012)

Dalam periode ini masa jabatan para Jaksa Agung relatif kurang stabil karena terjadi pergeseran atau pergantian Presiden sebanyak 3 kali yakni dari Presiden Soeharto digantikan Presiden BJ Habibie kemudian digantikan Presiden Abdurrahman Wahid dan digantikan lagi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri tetapi semua pemimpin Negara mengikuti Jenderal Soeharto yang memulai suatu konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti kabinet itu¹⁰². Jaksa Agung periode ini juga sudah mulai berasal dari kalangan internal kejaksaan sendiri bukan dari militer lagi seperti periode sebelumnya.

e. Pemberhentian Jaksa Agung Republik Indonesia

Pemberhentian Jaksa Agung di dalam periode ini rata rata banyak yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan hanya Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang diberhentikan karena meninggal dunia dalam masa jabatannya. Di dalam periode ini juga kembali menegaskan dari era Presiden Soekarno dimana pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogratif Presiden, yakni Jaksa Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden yang sesuai pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang mengatakan “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden”.

4.1.4 Periode tahun 2004-hingga saat ini

Pada periode ini Kejaksaan Agung telah tertata rapi dan sudah mandiri dan merdeka dalam hal penuntutan perkara dengan lahirnya Undang-Undang Kejaksaan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

¹⁰² *Op, Cit*, Yusril Ihza Mahendra 2010, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUDNRI Tahun 1945*. Hal 6

Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya.

Pada periode ini Negara Indonesia mengalami kemajuan dalam berdemokrasi di masa transisi era reformasi ini Negara Indonesia sudah mengandamen Undang-Undang Dasar hingga empat kali dan pemilihan Presiden dilakukan secara langsung yakni yang memilih presiden dan Wakil Presiden ialah seluruh rakyat Indonesia dengan suara terbanyak melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung tidak seperti dahulu yang dipilih oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR). Pada periode ini Presiden terpilih yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga dua periode dimana untuk pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2004 berpasangan dengan M. Jusuf Kalla sedangkan pada pemilu tahun 2009 berpasangan dengan Boediono.

a. Peraturan mengenai Kejaksaan dan Jaksa Agung Republik Indonesia

Peraturan yang berlaku pada zaman ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang sudah di amandemen empat kali pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Dasar hukum penetapan/pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia

Dasar hukum penetapan Jaksa Agung terdapat pada pasal 24 ayat (3) UUDNRI yakni “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan*

kehakiman diatur dalam undang-undang” serta Pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui dasar itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah, Maklumat Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden yang pada saat itu di jabat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

c. Masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia

Pada periode ini terdapat sekitar tiga (3) orang Jaksa Agung yang pernah menduduki jabatan tersebut hingga saat ini menjadi Jaksa Agung, yakni Abdul Rahman Saleh, Hendarman Supandji, dan yang sekarang masih menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia ialah Basrief Arief. Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak di atur secara jelas dan menjadi hak Prerogratif Presiden dan merupakan kewenangan penuh dari Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sesuai pasal 19 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Yang berbunyi “Jaksa Agung adalah Pejabat Negara dan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Jaksa Agung yang kedua puluh satu (21) ialah Abdul Rahman Saleh yang diangkat pada tanggal 21 Oktober 2004 melalui Keppres No. 187/M Tahun 2004 menggantikan Jaksa Agung M.A. Rachman, masa jabatan Jaksa Agung Abdul Rahman berlangsung kurang lebih dua setengah (2,5) tahun dan diberhentikan dengan hormat pada tanggal 9 Mei 2007. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melakukan pembenahan internal utamanya para jaksa-jaksa nakal dan pembaharuan Kejaksaan secara menyeluruh. Prioritas Jaksa Agung

pada saat itu menegakkan hukum dan memberantas korupsi sesuai janji Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono pada saat kampanye.¹⁰³

Jaksa Agung yang kedua puluh dua (22) ialah Jaksa Agung Hendarman Supandji yang diangkat pada bulan Mei Tahun 2007 dengan Keppres No. 34/P Tahun 2007 menggantikan Abdul Rahman Saleh, masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji berlangsung kurang lebih dua setengah tahun (2,5) hingga 24 September 2010. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung Hendarman Supandji melanjutkan program-program yang ditata oleh Jaksa Agung sebelumnya dan sambil bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi.¹⁰⁴

Jaksa Agung yang kedua puluh tiga (23) ialah Basrief Arief yang diangkat pada tanggal 26 November 2010 hingga saat ini masih menjabat sebagai Jaksa Agung menggantikan Hendarman Supandji.

Dalam periode ini masa jabatan para Jaksa Agung stabil namun terdapat sedikit permasalahan mengenai masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji dimana keabsahan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dianggap ilegal dan di ajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Yusril Ihza Mahendra. MK mengabulkan sebagian permohonan dan menganggap Jaksa Agung Hendarman tidak sah karena seharusnya masa jabatannya berakhir bersama-sama anggota kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama.

¹⁰³ Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Abdul Rahman Saleh*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012)

¹⁰⁴ Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. *Jaksa Agung Republik Indonesia Hendarman Supandji*. (online) http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksanaan (tanggal 15 Januari 2012)

Masa jabatan Jaksa Agung semakin jelas dengan adanya putusan MK yang menyatakan pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan UUDNRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan.”¹⁰⁵

d. Pemberhentian Jaksa Agung Republik Indonesia

Pemberhentian Jaksa Agung di dalam periode ini rata rata banyak yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya melalui Keputusan Presiden. Di dalam periode ini juga kembali menegaskan dari era Presiden Soekarno dimana pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan Hak Prerogratif Presiden, yakni Jaksa Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden yang sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatakan “Jaksa Agung adalah Pejabat Negara dan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Untuk mempermudah pembahasan di atas, dibawah ini akan digambarkan pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia dari awal Indonesia merdeka hingga saat ini.

¹⁰⁵ Putusan MK Nomor 49-PUU-VIII-2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 22 ayat (1) huruf d hal 134

Tabel 1.

**Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia dari awal
Indonesia merdeka hingga saat ini.**

No	Periode	Peraturan yang berlaku mengenai Kejaksaan dan Jaksa Agung	Jaksa Agung yang menjabat	Masa jabatan
1.	1945-1960	<ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 sebelum amandemen, - Konstitusi RIS - UUDS 1950, - UU No. 7 Th 1947 - UU No. 19 Th 1948 - Keputusan Presiden 	<ul style="list-style-type: none"> - Gatot Taroeneamihardja - Kasman Singodimedjo - Tirtawinata - R.Soeprapto - Goenawan - R. Kadaoresman 	<ul style="list-style-type: none"> - ±2 bulan - ±6 bulan - ±6 bulan - ±9 tahun - ±2 Tahun - ±2 Tahun
2.	1960-1990	<ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 sebelum amandemen, - UU No. 19 Th 1948, - Ketetapan MPRS No. I/II?1960 - UU No. 15 Th 1961, - Keputusan Presiden 	<ul style="list-style-type: none"> - R. Kadaoresman, - A. Soethardjo, - Soegih Arto, - Ali Said, - Ismail Saleh - Hari Suharto, - Sukarton - marosudjono - Singgih 	<ul style="list-style-type: none"> - ±2 Tahun - ±2 Tahun - ±6 Tahun - ±7 tahun - ±3 Tahun - ±4 Tahun - ±2 tahun - ±8 Tahun
3.	1990-2004	<ul style="list-style-type: none"> - UUDNRI 1945 sudah amandemen - UUD 1945 sebelum amandemen - UU No. 5 Th 1991 - Keputusan Presiden - Peraturan Presiden 	<ul style="list-style-type: none"> - Singgih - Soedjo C. - Atmonegoro - Andi Ghalib - Marzuki - Darusman - Baharuddin Lopa - Marsilam 	<ul style="list-style-type: none"> - ±8 Tahun - ±88 Hari - ±1 Tahun - ±1,5 Tahun - ±1,5 Tahun

			Simanjuntak M.A. Rachman	Bulan ±1 Bulan ±2,5 Tahun
4.	2004- hingga saat ini	<ul style="list-style-type: none"> UUDNRI 1945 sudah amandemen UU No. 16 Th 2004 Keputusan Presiden Peraturan Presiden 	<ul style="list-style-type: none"> Abdul Rahman Saleh Hendarman Supandji Basrief Arief 	<ul style="list-style-type: none"> ±2,5 Tahun ±3 Tahun Masih menjabat

Sumber: Bahan Hukum Sekunder diolah oleh penulis, Januari 2012.

4.2 Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung

Sebelum menguraikan tentang implikasi kedudukan Jaksa Agung sebagai pejabat negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung terlebih dahulu perlu dikaji mengenai kedudukan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang tersebut Jaksa Agung disebut sebagai pejabat negara yakni pada pasal 19 ayat (1) “Jaksa Agung adalah Pejabat Negara; ayat (2) “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.¹⁰⁶ Dari Presiden pertama Indonesia hingga saat ini terjadi banyak istilah untuk kedudukan Jaksa Agung, istilah itu terdiri dari pejabat tinggi negara, Menteri/Jaksa Agung, , bukan Menteri Negara, Pejabat Negara setingkat Menteri Negara. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai kedudukan Jaksa Agung.

¹⁰⁶ Lihat pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

4.2.1 Kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara

Ketika Indonesia merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 negara kita belum mempunyai peraturan yang jelas mengenai pengaturan Kejaksaan dan Jaksa Agung baik itu dari kedudukan, tugas, wewenang, pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Jaksa Agung sehingga pemerintah masih menggunakan peraturan lama yang berlaku yang diwariskan pemerintahan Belanda dan Jepang. Di dalam UUD 1945 hanya diatur didalam pasal II aturan peralihan yang menyatakan “segala badan-badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum ada diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, yang dikuatkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan Peraturan Pemerintah dulu yang menjelaskan dasar hukum pasal II aturan peralihan UUD 1945 dipakai.

Setelah pemerintahan berlangsung kurang lebih dua (2) tahun pemerintah dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Dalam Undang-Undang ini disebutkan Kejaksaan Agung terdiri atas satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.¹⁰⁷ Kemudian selanjutnya pemerintah dan Badan Pekerja Nasional Pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan yang mencabut Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947. Dalam Undang-Undang ini secara struktural organisasi, personil dan

¹⁰⁷ Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

keuangan baik jaksa maupun pengadilan berada dibawah Kementerian Kehakiman. Namun secara fungsional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada di bidang yudikatif. Memang ada kerancuan dengan kedudukan kejaksaan dan Jaksa Agung secara lembaga ada di ranah eksekutif dibawah Kementerian Kehakiman secara fungsi ada di dalam ranah yudikatif.

Ketika perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Deen Haag, Belanda dengan Kerajaan Belanda di sepakati tanggal 27 Desember 1949, Negara kita berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menganut sistem parlementer dikenal namanya Jaksa Agung RIS namun tidak lama tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sistem pemerintahannya tetap parlementer.

Kedudukan kejaksaan hingga tahun 1959 bersifat rancu mengikuti tata cara di Negara Belanda dimana secara lembaga ada di ranah eksekutif namun dalam melaksanakan fungsinya berada di ranah yudikatif. Namun di periode ini muncul seorang Jaksa Agung yang disebut Bapak kejaksaan karena jasa-jasanya ialah Jaksa Agung R. Soeprapto yang membenahi dan menata kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung R. Soeprapto berkeinginan menjadikan Jaksa Agung sebagai Institusi Negara yang independen, bebas dari campur tangan manapun dalam menjalankan tugasnya.

Tahun 1959 keluarlah Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1945 menjadi dasar Negara dan sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin atau sistem Presidensial. Dalam kabinet Kerja 1 Presiden Soekarno mempertegas kedudukan kejaksaan dan Jaksa Agung berada dalam ranah eksekutif dan Jaksa Agung adalah anggota kabinet dengan sebutan

Menteri/Jaksa Agung dan untuk mempertegas itu Presiden Soekarno Mengeluarkan Keppres No.204 Tahun 1960 yang memutuskan membentuk departemen kejaksaan di bawah Menteri/Jaksa.¹⁰⁸

Pada Tahun 1961 dibentuk Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan dan Jaksa Agung semakin jelas berada di ranah eksekutif dan Jaksa Agung diberi kedudukan setingkat menteri Negara. Implikasinya terhadap masa jabatan jaksa Agung sepenuhnya berada pada hak prerogatif Presiden yang mengangkat dan memberhentikan jaksa Agung tersebut sehingga masa jabatan Jaksa Agung tergantung oleh Presiden, karena tidak diatur di dalam Undang-Undang kejaksaan yang berlaku.

Pada tanggal 25 Juli 1966, Kabinet Dwikora yang disempurnakan dibubarkan dan dibentuklah Kabinet Ampera, dimana Jaksa Agung tidak di cantumkan sebagai Menteri. Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 status Kejaksaan sebagai departemen diiadakan dan Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai Lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat dan Jaksa Agung tidak diberi kedudukan Menteri. Hal tersebut ditegaskan dalam keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 26/U/KEP/9/66 tanggal 6 September 1966 tentang penegasan status Kejaksaan Agung.¹⁰⁹

Namun setelah pemilihan umum (pemilu) pada Tahun 1971 Presiden Soeharto memulai sebuah konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa

¹⁰⁸ Lihat Keputusan Presiden Nomor 204 tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen Kejaksaan

¹⁰⁹ Adi Baskoro. *Analisis eksistensi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2005 Hal 36

kabinet itu.¹¹⁰ Artinya masa jabatan Jaksa Agung sesuai konvensi ketatanegaraan mengikuti masa bakti kabinet yaitu sama dengan masa jabatan Presiden dan kabinet yang dibentuknya. Konvensi ketatanegaraan di populerkan oleh Dicey sarjana hukum di Inggris. Konvensi adalah ketentuan yang mengatur bagaimana seharusnya Kepala Negara atau Menteri-Menteri melaksanakan “*Discretionary Powers*”, yang dimaksud “*Discretionary Powers*” adalah kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak yang semata-mata didasarkan kepada kebijaksanaan atau pertimbangan pemegang kekuasaan.¹¹¹

Pada masa Kabinet Pembangunan IV, kedudukan Jaksa Agung setingkat dengan Menteri Negara yang tercantum dalam Keppres No. 48/M tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983. Dalam pemberian kedudukan tersebut 38 Kejaksaan tidak berubah menjadi Departemen.¹¹²

Tahun 1991 dibentuk Undang-Undang kejaksaan yang baru menggantikan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan tetap mempertegas bahwa kejaksaan berada di bawah eksekutif sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang ada pada pasal 2 ayat (1). Jaksa Agung tetap sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri dan implikasinya mengenai masa jabatannya tetap mengikuti konvensi ketatanegaraan dimana sepenuhnya hak prerogratif Presiden yang tertuang di dalam pasal 19 “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden”.

¹¹⁰ Op, Cit, Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUDNRI Tahun 1945*. Hal 6

¹¹¹ Bagir Manan. *Konvensi Ketatanegaraan*. Yogyakarta. FH UII Press. 2006, hal 60

¹¹² Op. Cit, Adi Baskoro. *Analisis eksistensi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia* hal 37

Tahun 2004 dibentuk Undang-Undang Kejaksaan yang baru menggantikan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap mempertegas bahwa kejaksaan berada di bawah eksekutif sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang ditambahkan di lakukan secara merdeka.¹¹³ Dalam perancangan dan pembahasannya sempat terjadi perdebatan di DPR perbedaan prinsipil antara rancangan pemerintah dan DPR terletak pada menafsirkan ketentuan pasal 24 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 dalam kaitannya dengan kedudukan kejaksaan kejaksaan serta proses rekrutmen Jaksa Agung dan masa jabatan Jaksa Agung.¹¹⁴ Hasilnya Jaksa Agung tetaplah Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan Presiden dan masa jabatan tidak diatur melainkan hak prerogatif Presiden yang menentukannya karena Jaksa Agung Pejabat Negara setingkat Menteri yang termasuk dalam anggota kabinet.

Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 butir 4 yang dimaksud pejabat negara ialah:

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.

Kemudian di dalam pasal 11 ayat (1) juga dijelaskan mengenai Pejabat Negara yang terdiri atas¹¹⁵:

- (1) Pejabat Negara terdiri dari atas :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

¹¹³ Lihat pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹¹⁴ *Op, Cit*, Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUDNRI Tahun 1945*. Hal 7

¹¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok kepegawaian

- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- undang

Undang-Undang Kejaksaan dan Kepegawaian memberi penjelasan jika Jaksa Agung itu sebagai pejabat Negara, karena Jaksa Agung pimpinan tertinggi di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan diamanahkan melalui Undang-Undang yang menyebutkan Jaksa Agung adalah pejabat Negara. Di dalam Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 331/7 Tahun 2007 juga dituliskan dengan jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dengan kedudukan setingkat Menteri Negara.¹¹⁶

Berikut akan di diperjelas dalam bentuk tabel agar mudah dipahami mengenai kedudukan Jaksa Agung sebagai pejabat Negara dari masa ke masa.

Tabel 2.

Kedudukan Jaksa Agung dari masa ke masa

No.	Periode Presiden	Kedudukan Jaksa Agung	Dasar Hukum
1.	Presiden Soekarno (1945-1966)	Pejabat tinggi Negara, Menteri Ex Officio, Pegawai tinggi Departmen Kehakiman,	UUD 1945, KRIS, UUDS, UU No. 19 Th 1948, UU No.15 Th 1961, Keppres

¹¹⁶ Lihat Keputusan Presiden Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 dan Nomor 331/7 Tahun 2007

		Menteri/Jaksa Agung departemen kejaksaan, pejabat penuntut umum	No.204, Rh 1960, Ketetapan MPRS No.I dan II Th 1960
2.	Prsiden Soeharto (1966-1998)	Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung, Jaksa Agung setingkat Menteri Negara, Pejabat Negara, bukan menteri	UUD 1945, UU No. 5 Th 1991, Surat keputusan Wakil Perdana Menteri bidang pertahanan dan keamanan No. KEP/A/16/1966, Keputusan Presidium ampera No.26/U/KEP/9/66, Keppres, No.48/M Th 1983
3.	Presiden BJ habibie (1998-1999)	Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung, Jaksa Agung setingkat Menteri Negara, Pejabat Negara	UUD 1945, UU No. 5 Th 1991, Keppres Kabinet Reformasi
4.	Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)	Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung, Jaksa Agung setingkat Menteri Negara, Pejabat Negara	UUD 1945, UU No. 5 Th 1991, Keppres Kabinet Persatuan Nasional
5	Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004)	Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung, Jaksa Agung setingkat Menteri Negara, Pejabat Negara	UUDNRI 1945 sudah amandemen, UU No. 5 Th 1991, UU No. 16 Th 2004, Keppres Kabinet Gotong Royong
6	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-hingga kini)	Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung, Jaksa Agung setingkat Menteri Negara, Pejabat Negara	UUDNRI 1945 sudah amandemen, UU No. 2004, Keppres Nomor 187/M Tahun 2004 dan Nomor 331/7 Tahun 2007 Kabinet Indonesia Bersatu

Sumber : Bahan Sekunder diolah oleh penulis, Februari 2012

Dalam tabel diatas memberi gambaran mengenai kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara dari mulai Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menempatkan lembaga Kejaksaan Berada pada ranah

eksekutif dan Jaksa Agung kedudukannya berpredikat sebagai Menteri/Jaksa, Pegawai tinggi Kejaksaan dalam departemen Kehakiman, pejabat Negara setingkat menteri negara.

4.2.2 Implikasi Yuridis Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara terhadap masa jabatan Jaksa Agung

Tahun 2010 terjadi peristiwa dimana Yusril Ihza Mahendra (mantan Sesneg) menganggap Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak sah dan dianggap illegal karena habis masa jabatannya, sementara pemerintah bersikukuh Hendarman Supandji tetap sah walau tidak dilantik lagi menjadi Jaksa Agung karena Keppres sebelumnya belum dicopot. Akhirnya Yusril mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pengujian Undang-Undang pasal 22 ayat (1) huruf d Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia (UU Nomor 16 tahun 2004).

Adapun pendapat Yusril dalam permohonannya mengenai pasal 22 ayat 1 huruf d menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 (UU No.16 Tahun 2004) tidak diatur masa jabatan Jaksa Agung. Dengan keadaan ini berpotensi menjadikan seorang Jaksa Agung akan memangku jabatan seumur hidup.¹¹⁷ Sebenarnya perdebatan permasalahan ini sudah dikhawatirkan ketika DPR dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai masa jabatan Jaksa Agung.

Lebih jauh Yusril berpendapat penafsiran yang benar dan konstitusional atas ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 dihubungkan dengan pasal 1 dan pasal 28D ayat (1) adalah tafsir yang menyatakan bahwa

¹¹⁷ *Op. Cit*, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49-PUU-VIII-2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 22 ayat (1) huruf d hal 8

Presiden mengangkat Jaksa Agung dan menyesuaikan masa jabatan Jaksa Agung sesuai dengan masa bakti kabinet, yang juga bersamaan dengan masa jabatan Presiden. Dalam Negara hukum yang demokratis segala jabatan Negara haruslah dibatasi jangka waktunya.¹¹⁸

Pendapat Yusril ini karena didasari praktek konvensi ketatanagaraan yang dari dulu sudah dilakukan mulai Presiden Soekarno dan efektifnya ketika Presiden Soeharto tepatnya dimulai tahun 1971 di lanjutkan dengan Presiden seterusnya BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Dimana mengangkat Jaksa Agung di awal kabinet dengan Keppres dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa kabinet tersebut atau jika memberhentikan Jaksa Agung sebelum masa bakti Presiden selesai, Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat menggunakan keppres. Seperti halnya yang dilakukan SBY ketika *resuffle* kabinet yang menggantikan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dengan Hendarman Supandji pada tahun 2007.

Yusril di dalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi ahli yakni Bagir Manan, Laica Marzuki, Andi Muhammad Asrun, Margarito Kamis, Natabaya dan Erman Rajaguguk. Bagir Manan dalam kesaksiannya menyatakan Masa Jabatan Jaksa Agung bukan jabatan seumur hidup maka jabatan itu akan berakhir pada waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang kejaksaan, jaksa berakhir masa jabatannya pada usia 62 tahun dengan hak pensiun, sehingga Jaksa Agung sebagai Jaksa menurut Undang-Undang wajib pensiun pada usia 62 tahun. Jika Jaksa

¹¹⁸ *Ibid.*, hal 11

Agung diperlakukan sebagai anggota kabinet, maka Jaksa Agung akan berhenti bersama-sama anggota kabinet lainnya.¹¹⁹

Menurut Laica Marzuki Jaksa Agung adalah jabatan publik di bawah Presiden, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, “bahwasanya Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Jabatan Jaksa Agung, menurut pasal 19 UU Nomor 16 tahun 2004 adalah pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004, bahwa frasa “Berakhirnya masa jabatan” Jaksa Agung adalah bersamaan dengan berakhirnya masa bakti suatu kabinet, yang di dalamnya termasuk Jaksa Agung selaku anggota kabinet, berkedudukan setingkat Menteri Negara.¹²⁰

Menurut Andi Muhammad Nasrun, pada jabatan Negara, maka pimpinan tertinggi pada organisasi Negara diangkat berdasarkan kategori sebagai “*poticallly appointed*” dapat dilihat sebagai contohnya adalah pengangkatan Jaksa Agung di Indonesia. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, organisasi jabatan publik dan pejabat publik merupakan instrument kekuasaan Negara yang dijalankan dalam kerangka semangat konstitusi Negara. Dalam praktek ketatanegaraan (konvensi), pengangkatan Jaksa Agung sebagai pejabat Negara setingkat menteri ataupun sebagai anggota kabinet berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota kabinet lainnya.¹²¹

Menurut Margarito Kamis, awal organisasi Kejaksaan diciptakan, Kejaksaan tidak pernah dimaksudkan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif. Jaksa melaksanakan fungsi yang secara umum dipersepsikan berhimpitan atau

¹¹⁹ *Ibid.*, hal 27

¹²⁰ *Ibid.*, hal 30

¹²¹ *Ibid.*, hal 31

berdekatan dengan kekuasaan yudikatif. Bukan Negara hukum yang demokratis atau bukan Negara hukum kalau tidak ada pembatasan kewenangan atau tidak ada pembatasan masa jabatan. Masa jabatan Jaksa Agung adalah lima (5) tahun yang ditentukan sejak pelantikan karena jelas Jaksa Agung itu menjadi bagian dari pemerintah dan diangkat bersamaan dengan menteri-menteri menjadi pembantu Presiden. Hitungan lima (5) tahun karena mengikuti masa jabatan Presiden. Patokan tersebut adalah masa jabatan Presiden yang analoginya sama dengan masa jabatan Menteri.¹²²

Menurut Natabaya, dalam hukum tata Negara positif Indonesia, banyak dikenal cara menempati jabatan, yaitu cara penunjukan, dengan cara pengangkatan atau cara lain yang diatur dalam hukum positif, dan juga cara-cara seperti turun-temurun dalam suatu kerajaan. Dalam pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2004 menentukan, “Jaksa Agung adalah pejabat Negara, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, berarti perolehan jabatan adalah dengan pengangkatan atau penunjukan oleh Presiden.”¹²³

Menurut Erman Rajaguguk, Jaksa Agung Republik Indonesia selalu diangkat oleh Presiden di awal pembentukan kabinet dan jabatan itu berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa bakti kabinet yang disesuaikan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima (5) tahun. Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia selalu dimuat di dalam keputusan Presiden tentang pembentukan dan/atau *reshuffle* kabinet demikian pula pemberhentian Jaksa

¹²² *Ibid.*, hal 32

¹²³ *Ibid.*, hal 33

Agung dilakukan bersama-sama dengan pemberhentian seluruh anggota kabinet.¹²⁴

Saksi saksi ahli yang diajukan pemohon banyak berpendapat jika Jaksa Agung sebagai Pejabat negara setingkat Menteri atau dikategorikan anggota kabinet karena diangkat bersama-sama dengan menteri yang lain, maka masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa bakti kabinet tersebut dan sama dengan masa jabatan Presiden yang membentuk kabinet tersebut.

Sementara Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham (kemenkumham) berpendapat berbeda yakni bahwa UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan untuk mengatur tentang kedudukan Kejaksaan, susunan kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan, sampai pada pengaturan secara khusus tentang Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan. Kedudukan Jaksa Agung sebagai pejabat Negara, pengangkatan Jaksa Agung dan pemberhentian dengan hormat Jaksa Agung oleh Presiden.¹²⁵

Selain itu harus dibedakan antara Jaksa Agung sebagai pejabat Negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden dengan jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan (pidana) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya Jaksa Agung setiap waktu/dalam waktu tertentu dapat diganti/diberhentikan oleh Presiden, sedangkan jaksa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung dibatasi oleh ketentuan pensiun yaitu telah mencapai usia enam puluh dua (62) tahun, kecuali terdapat alasan lain yang dapat dijadikan dasar untuk

¹²⁴ *Ibid.*, hal 34

¹²⁵ *Ibid.*, hal 40

memberhentikan dengan tidak hormat.¹²⁶ Pemerintah dalam menguatkan argumentasinya mengajukan saksi-saksi ahli yakni Achmad Roestandi, Philipus M. Hadjon, Fajrul Falaakh, Adnan Buyung Nasution, Denny Indrayana.

Menurut Achmad Roestandi dalam kesaksiannya berpendapat, jaksa adalah merupakan genus yang dibedakan spesiesnya menjadi Jaksa Agung dan jaksa bukan Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah Pejabat Negara sedangkan jaksa bukan Jaksa Agung bukan pejabat Negara tetapi harus PNS. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sedangkan jaksa bukan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. jaksa bukan Jaksa Agung umur minimal pengangkatan 25 sampai 35 tahun. Kalau Jaksa Agung tidak ada batasnya pengangkatannya. Jaksa bukan Jaksa Agung mempunyai syarat lain untuk diangkat yaitu harus lulus pendidikan dan latihan pendidikan jaksa, sedangkan Jaksa Agung tidak. Akibatnya, misalnya di dalam syarat umur, jaksa adalah 62 tahun, sedangkan Jaksa Agung bisa seumur hidup karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Masa jabatan Jaksa Agung yang seumur hidup bukan berarti tidak demokratis karena tidak selalu demokrasi itu harus ada masa jabatan. Kalau mau merubah aturan tersebut, maka bukan melakukan *yudicial review*, tetapi harusnya adalah *legislative review*.¹²⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, dari sisi hukum maka isu legalitas Jaksa Agung adalah isu dalam ranah *ius constitutum*, sedangkan isu tentang masa jabatan Jaksa Agung, kalau dicermati UU Kejaksaan Agung maka isu tersebut masuk dalam ranah *ius constituendum*. Pada ranah *ius constitutum* titik tolak adalah UU Kejaksaan. Pada pasal 19 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004

¹²⁶ *Ibid.*, hal 41

¹²⁷ *Ibid.*, hal 43

menyatakan, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Pasal 22 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 mempertegas, diberhentikan dengan Keppres. Berdasarkan pasal 20 UU Nomor 16 Tahun 2004, tidak ada syarat Jaksa Agung harus seorang jaksa. Dengan sendirinya Jaksa Agung bukan jabatan karier. Dengan demikian, persoalannya adalah mengenai kewenangan. Hal tersebut bukanlah diskresi melainkan kewenangan Presiden.¹²⁸

Menurut Fajrul Faalakh, UU Nomor 16 Tahun 2004 menentukan bahwa Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya antara lain, kalau berakhir masa jabatannya. Kalau mau diterapkan pensiun pada usia 62 tahun, tidak berlaku bagi jabatan Jaksa Agung karena pensiun pada usia 62 tahun berlaku bagi jaksa karir yaitu PNS jaksa. Jaksa Agung berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 bukan lagi jabatan karir melainkan pejabat Negara. Jaksa Agung dilarang merangkap jabatan menteri, sehingga masa jabatan Jaksa Agung tidak boleh disamakan dengan masa jabatan Menteri. Penyamaan masa jabatan Jaksa Agung dengan kabinet adalah berdasarkan konvensi. Mengenai kedudukan Jaksa Agung, dengan jelas Undang-Undang menentukan bahwa Jaksa Agung itu sekarang adalah pejabat Negara dan dilarang merangkap jabatan Negara lainnya. Dengan demikian, Jaksa Agung bukan menteri. Penyebutan setingkat menteri itu hanya kaitannya dengan pengajian dan lain-lain.¹²⁹

Menurut Adnan Buyung Nasution, tidak benar masa jabatan Jaksa Agung tidak diatur, sebab berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 ditentukan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia, permintaan

¹²⁸ *Ibid.*, hal 43-44

¹²⁹ *Ibid.*, hal 45-46

sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, berakhir masa jabatannya, tidak lagi memenuhi syarat. Ditentukan pula bahwa pemberhentian itu ditetapkan dengan Keppres. Jabatan Negara setingkat dengan menteri artinya hak-hak keuangannya, administrasinya, fasilitas-fasilitas lainnya itu diberikan setingkat dengan menteri negara. Masa jabatan Jaksa Agung bukan tidak ada batasnya atau seumur hidup karena jelas dikatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi ada masa jabatan, yaitu diangkat sampai dengan diberhentikan. Terdapat diskresi Presiden untuk melihat apakah Jaksa Agung layak atau tidak layak.¹³⁰

Menurut Denny Indrayana, walaupun ada jabatan seumur hidup bukan berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Alternatif jabatan seumur hidup justru dapat sangat berkaitan dan sangat menguatkan prinsip independensi satu lembaga. Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung bukan anggota kabinet, anggota kabinet itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sedangkan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung diatur dengan Undang-Undang masing-masing. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 menegaskan bahwa kabinet itu terdiri dari maksimal 34 kementerian saja dan itulah yang menjadi dasar Keppres terakhir, diluar 34 orang ini bukan anggota kabinet. Setingkat Menteri Negara, bukan berarti Menteri Negara. Pada Keppres disebutkan “Setingkat Menteri Negara”. Menteri Negara dan Setingkat Menteri Negara adalah dua hal yang berbeda, selain dari diksinya berbeda tingkat disini hanya terkait dengan masalah-masalah administrasi, terkadang protokoler. Masa

¹³⁰ *Ibid.*, 46-47

jabatan pejabat Negara memang berbeda-beda dan perbedaan itu merupakan politik hukum Legislasi.¹³¹

Saksi-saksi ahli dari pemerintah banyak berpendapat mengenai harus dibedakannya antara jaksa biasa atau PNS dengan Jaksa Agung karena sesuai dengan UU Kejaksaan yang berlaku jelas berbeda dan juga mengenai Jaksa Agung sebagai pejabat negara setingkat menteri bukan berarti Jaksa Agung sama dengan menteri melainkan sama dalam pengertian soal pengganjian, administrasi dan fasilitas-fasilitas pejabat negara.

Selain dari pihak pemohon dan pemerintah ada juga pendapat dari DPR yang menyatakan bahwa kedudukan Jaksa Agung yang setingkat dengan Menteri Negara karena diangkat dalam dalam kabinet, maka berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung sama dengan berakhirnya masa kedudukan Menteri Negara dalam kabinet. DPR berpandangan bahwa kedudukan Jaksa Agung Republik Indonesia yang diangkat setingkat Menteri Negara dalam kabinet tidaklah bermakna bahwa menteri Negara dan Jaksa Agung merupakan sebuah jabatan dalam lingkup kedudukan jabatan yang sama.¹³²

Mengingat Kementerian dan Jaksa Agung masing-masing diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, yaitu Menteri diatur dalam UU Kementerian Negara dan Jaksa Agung diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian sesungguhnya kedudukan Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menjelaskan bahwa kedudukan Jaksa Agung bukanlah bagian dari kabinet. Oleh karena itu jika ada

¹³¹ *Ibid.*, 47-48

¹³² *Ibid.*, 52

produk hukum (Keppres) yang menyatakan Jaksa Agung merupakan bagian dari kabinet maka hal tersebut dapat diuji secara materiil di Mahkamah Agung.¹³³

Bahwa terkait dengan hal tersebut, DPR berpendapat bahwa kedudukan Jaksa Agung yang disetarakan setingkat dengan Menteri Negara hanya terkait dengan hak-hak administrasi dan keprotokolan sebagai pejabat Negara, oleh karena itu sangat tidak relevan jika berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung di samakan dan disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Menteri Negara dalam kabinet. Sebab sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kedudukan Menteri Negara yang diatur UU Kementerian Negara, dengan kedudukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diatur dalam UU Kejaksaan Republik Indonesia adalah berbeda diantara keduanya.¹³⁴

Keterangan dari DPR pada intinya menguatkan apa yang diargumentasikan oleh pemerintah yang tetap menganggap Jaksa Agung bukan jaksa biasa dan walau Jaksa Agung setingkat menteri itu hanya mengenai administrasi saja dan halhal keprotokolan.

Setelah mendengar dalil-dalil dari pemohon dan pemerintah serta DPR dan kesaksian-kesaksian para ahli, Mahkamah Konstitusi (MK) menelaah dan mempertimbangkan. Dalam pertimbangan hukumnya MK berpendapat, pemahaman yang berkaitan dengan makna frasa “diberhentikan dengan hormat dari jabatannya” dan frasa “berakhir masa jabatannya” dalam hubungannya dengan fungsi, tugas, dan wewenang dari suatu jabatan adalah sebagai berikut¹³⁵:

- a. Frasa “*diberhentikan dengan hormat dari jabatannya*” dapat dimaknai dengan pemberhentian seorang pejabat dari segala fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan atau dibebankan kepadanya, karena

¹³³ *Ibid.*, 52

¹³⁴ *Ibid.*, 52

¹³⁵ *Ibid.*, 126

dia telah melaksanakan fungsi dan wewenang tersebut, dan dianggap bahwa segala sesuatu yang diamanatkan telah dilaksanakan dengan baik dan paripurna. Frasa “*diberhentikan dengan hormat dari jabatannya*” dalam penerapannya dapat dilakukan kapan saja tergantung pada kapan fungsi dan wewenang tersebut selesai menurut seseorang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan. Dalam kaitannya dengan sifat wewenang pemerintahan terdapat tiga ciri, yaitu: a) selalu terikat pada suatu masa tertentu; b) selalu tunduk pada batas yang ditentukan; dan c) pelaksanaan wewenang terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis;

- b. Sifat wewenang pertama, yaitu, “selalu terikat pada suatu masa tertentu” mempunyai makna bahwa lamanya wewenang tersebut ditentukan dalam peraturan yang menjadi dasar pemberiannya, yang biasa disebut dengan lingkup waktu (*tijdsgebied*). Sifat wewenang kedua yaitu, “selalu tunduk pada batas yang ditentukan” yang berarti terdapat batas yang ditentukan, baik yang mencakup batas wilayah kewenangan (*plaatsgebied*) maupun batas cakupan materi kewenangan (*ruimtegebied*). Sifat yang ketiga, yaitu, “pelaksanaan wewenang terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis” yang berarti pelaksanaan wewenang tersebut terikat pada hukum tertulis (peraturan-peraturan negara/asas legalitas) maupun pada hukum tidak tertulis (asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik);
- c. Frasa “berakhir masa jabatannya” selalu dikaitkan dengan saat atau waktu tertentu yang biasanya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu peraturan yang dibentuk untuk pelaksanaan dari jabatan tersebut, sehingga masa jabatan dari pemegang jabatan seharusnya diatur secara tegas untuk menghindarkan adanya pelampauan kewenangan;

Dalam pertimbangan hukum MK sependapat dengan beberapa ahli dari pemohon yakni Bagir Manan, Laica Marzuki, Natabaya, untuk beberapa bagian yang substantif, tetapi tidak sependapat dalam hal implikasinya untuk saat ini karena ada keadaan atau persyaratan yang tidak dipenuhi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. MK sependapat dengan para ahli tersebut, jika Jaksa Agung yang diangkat dalam jabatan politik setingkat Menteri maka masa jabatannya harus sudah berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang mengangkatnya, sedangkan apabila Jaksa Agung diangkat berdasarkan karirnya sebagai jaksa maka masa tugasnya harus berakhir pada saat mencapai usia pensiun. Secara substansi, MK sependapat bahwa apabila tidak memenuhi

ketentuan itu maka jabatan Jaksa Agung dapat dianggap *illegal*. Dengan kata lain, MK juga sependapat dengan ketiga Ahli bahwa jabatan Jaksa Agung seharusnya dibatasi secara tegas, berdasar periodisasi pemerintahan atau berdasar usia pensiun.¹³⁶

Dalam hal permasalahan *ius contitutum* dan *ius constituendum* MK dapat menerima pandangan Ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Philipus M. Hadjon tentang asas *praesumptio iustae causa* bahwa selama belum ada Keputusan Presiden tentang pemberhentian maka jabatan Jaksa Agung tetap melekat kepada yang bersangkutan. Pandangan MK tentang ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Undang-Undang sendiri tidak mengaturnya secara tegas, tidak memberi kepastian hukum yang imperatif kepada Presiden, sehingga pilihan kebijakan Presiden tentang hal tersebut tidak dapat dinilai bertentangan dengan Undang-Undang.¹³⁷

Dalam pertimbangan hukumnya MK berpendapat¹³⁸:

Untuk menentukan masa tugas pejabat negara sebagai pejabat publik harus ada kejelasan kapan mulai diangkat dan kapan saat berakhirnya masa tugas bagi yang bersangkutan agar ada jaminan kepastian hukum sesuai dengan kehendak konstitusi. Menurut Mahkamah, sekurang-kurangnya ada empat alternatif untuk menentukan kapan mulai diangkat dan saat berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya *in casu* Jaksa Agung, yaitu, *pertama*, berdasar periodisasi Kabinet dan/atau periode masa jabatan Presiden yang mengangkatnya; *kedua*, berdasar periode (masa waktu tertentu) yang *fixed* tanpa dikaitkan dengan jabatan politik di kabinet; *ketiga*, berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan; *keempat*, berdasarkan diskresi Presiden/pejabat yang mengangkatnya.

Dalam pendapat MK tersebut bisa menjadi alternatif yang harus dipahami dengan baik oleh pemerintah dan DPR dalam melakukan *legislative review*

¹³⁶ *Ibid.*, 131

¹³⁷ *Ibid.* 131

¹³⁸ *Ibid.* 132-133

nantinya, masa jabatan Pejabat Negara memang harus ada batasannya agar jelas dan tegas sehingga tidak memunculkan polemik dikemudian hari.

Untuk memperjelas penafsiran mengenai masa jabatan Jaksa Agung, dalam Konklusi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya memutuskan¹³⁹ :

- a. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “*masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan*”.
- b. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan*”.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah mengakhiri polemik dan perdebatan mengenai masa jabatan Jaksa Agung, yakni masa Jabatan Jaksa Agung berakhir dengan masa jabatan Presiden dalam satu periode dan menyarankan pemerintah dan DPR melakukan *legislative Review*. Namun dalam putusan tersebut terdapat pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari dua (2) hakim Konstitusi, yakni Achmad Sodiki dan Harjono. Jadi jelas sudah implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung mengharuskan mengikuti masa bakti kabinet atau masa jabatan Presiden atau jika

¹³⁹ *Ibid.*134-135

diberhentikan ditengah masa kabinet diberhentikan dengan Keppres agar jelas legalitasnya.

Dalam putusan MK tersebut mempertegas bahwa Jaksa Agung sebagai pejabat Negara itu setingkat dengan Menteri dalam kabinet yang dibentuk oleh Presiden terpilih dalam Pilpres (pemilihan Presiden secara langsung) sehingga dalam masa jabatan Jaksa Agung jika awalnya diangkat bersama dengan menteri melalui Keppres seyogyanya jika ingin memberhentikan dengan hormat harus dengan Keppres dan jika ingin Jaksa Agung tetap memimpin institusi Kejaksaan Republik Indonesia namun masa bakti kabinet telah habis waktunya maka sebaiknya diangkat kembali dan dituangkan dalam Keppres yang sesuai dengan pasal 19 ayat (2) “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, dan pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Jadi berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini merupakan hak prerogatif Presiden dimana Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini dilakukan dalam beberapa periode yang terdiri dari periode 1945-1960, periode 1960-1990, periode 1990-2004 dan periode 2004 hingga saat ini.
2. Implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung ialah masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan anggota kabinet atau masa bakti kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan Presiden tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka penulis menyarankan agar :

1. Sebaiknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat Undang-Undang yang diberi tugas oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia melakukan legislative review atau merivisi atau mengamandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih komprehensif dan tidak menimbulkan multi tafsir.

2. Sebaiknya para pembuat Undang-Undang yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengamandemen Undang-Undang mengenai Kejaksaan Republik Indonesia nantinya mengacu pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru baik itu muatan dalam Undang-Undang serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus terpenuhi dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Serta memperhatikan pengaturan mengenai kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung yang jelas agar mudah dipahami, baik itu dari hal pengangkatan, pemberhentian serta masa jabatan Jaksa Agung dalam memimpin Kejaksaan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rachmad budiono, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bayumedia Publishing. Malang
- Abdul Rahman Saleh, 2008. *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustad*, memoir 930 Hari di Puncak Gedung Bundar. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Antonius Sujata, 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Djambatan. Jakarta.
- Bagir Manan, 2006. *Konvensi Ketatanegaraan*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Baharudin Lopa, 2001. *Kejahatan korupsi dan penegakan hukum*. Kompas. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution 2008. *Metode Penelitian Hukum*. CV Mandar Maju. Bandung
- Dahlan Thaib, 2010. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dasril Rajab, 1994. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- C.S.T Kansil, 2007. *Mata kuliah Dasar Ilmu Negara*. Sinar Grafika. Jakarta
- C.S.T Kansil, 2008. *Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga kini*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Marwan Effendi, 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moh. Kusnadi dan Ibrahim Harmaily. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan penelitian hukum*. Citra aditya bakti. Bandung.
- Ni'matul Huda, 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja grafindo Persada. Jakarta.
- Philupus M. Hadjon, dkk, 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Soehino. 1985. *Hukum Tata Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto,. 1991. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta

JURNAL ILMIAH

- Riri Nazriyah, 2010. *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*. Jurnal Konstitusi Volume 7 nomor 5 Oktober 2010 diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS)
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1951 tentang pengangkatan Tirtawinata sebagai Menteri Ex Officio
Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tentang pembentukan Departemen Kejaksaan.
Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahan dan Keamanan NO: KEP/A/16/1966.
Keputusan Presidium Kabinet Apera Nomor 26/U/KEP/66
Ketetapan MPRS No.I Tahun 1960
Ketetapan MPRS No.I Tahun 1960
Keputusan Presiden Nomor 48/M Tahun 1983
Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Jabatan fungsional Jaksa.
Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.
Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 331/P Tahun 2007 tentang *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

SKRIPSI DAN MAKALAH

Adi Baskoro, 2005. *Analisis eksistensi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tahegga Primananda Alfath, 2011. *Revitalisasi Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepolisian Republik Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

Makalah Jimly Asshidiqie. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham RI, 14-18 Juli 2003.

Makalah Yusril Ihza Mahendra. *Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*. 8 Agustus 2010/28 Sya'ban 1432.

KAMUS

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

INTERNET

<http://kamusbesar.bahasa.indonesia.com> (25 oktober 2010)

<http://nasional.kompas.com/read/2011/09/26/20532135/Saatnya.Amandemen.UU.Kejaksaan>. (14 desember 2011)

<http://nasional.kompas.com/read/2011/12/13/13292657/Jaksa.Agung.Diusulkan.Dipilih.DPR> (14 desember 2011).

<http://reformasihukumindonesia.blogspot.com/2010/10/keabsahan-dan-legalitas-jaksa-agung.html> (14 desember 2011).

<http://yustisi.com/2010/08>, di akses 28 September 2010.

[http://yusril.ihzamahendra.com/2010/07/28/artikel denny indrayana kemerdekaan jaksa agung non kabinet](http://yusril.ihzamahendra.com/2010/07/28/artikel%20denny%20indrayana%20kemerdekaan%20jaksa%20agung%20non%20kabinet), (online) (5 Oktober 2010).

[http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/ kedudukan kejaksaan dan posisi jaksa agung dalam sistem presidensial di bawah uud 1945](http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945). (online) (10 Oktober 2010).

R.Soeprapto. *Biografi Singkat* (online) <http://www.rsoeprapto.com/biografi-singkat.htm> (tanggal 15 Januari 2012).

Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia (online) [http://www.kejaksaan.go.id./](http://www.kejaksaan.go.id/)(14 Desember 2011).

Wikipedia. 2012. *Jaksa Agung Amerika Serikat*. (online) [http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa Agung Amerika Serikat](http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Amerika_Serikat). (tanggal 20 Januari 2012)